



dpmptsp
aceh

LAPORAN HAMBATAN PENANAMAN MODAL ACEH 2022

Laporan Hambatan Penanaman Modal Aceh 2022 diharapkan melahirkan kebijakan penyelesaian berbagai faktor penghambat penanaman modal di Aceh melalui pelibatan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya masyarakat, aparat keamanan dan penegak hukum lainnya, sekaligus mendukung iklim penanaman modal yang kondusif di Aceh.

www.dpmptsp.acehprov.go.id

    [dpmptspaceh](#)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita, sehingga "**Laporan Hambatan Penanaman Modal Aceh 2022**" telah dapat diselesaikan melalui *teamwork* Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (P2IPM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh bekerjasama dengan *Institute for Statistics for Socio Ecological Development (ISSED)* dan tenaga bantuan teknis dari Universitas Syiah Kuala (USK). Shalawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menyebarkan ilmunya dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam sampai akhir jaman.

Laporan Hambatan Penanaman Modal Aceh 2022 merupakan salah satu laporan hasil survei tahunan yang disusun oleh DPMPTSP Aceh dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat berbagai kegiatan penanaman modal di Aceh, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Survei dilakukan dengan instrumen kuesioner yang berisikan 6 (enam) variabel, meliputi Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), Masyarakat dan Lingkungan sekitar (Keamanan dan Kenyamanan), Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur, Regulasi dan Administrasi Pemerintah, Penggunaan Bahan Baku Lokal dan Kondisi Pasar. Setiap variabel yang diukur memiliki indikator masing-masing dengan menggunakan Skala Likert.

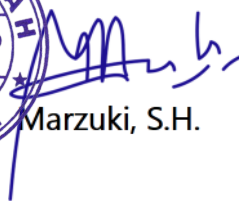
Laporan Hambatan Penanaman Modal Aceh 2022 diharapkan melahirkan kebijakan penyelesaian berbagai faktor penghambat penanaman modal di Aceh melalui pelibatan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya masyarakat, aparat keamanan dan penegak hukum lainnya, sekaligus mendukung iklim penanaman modal yang kondusif di Aceh.

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan survei, identifikasi dan evaluasi data hambatan penanaman modal di Aceh sampai penyusunan Laporan Hambatan Penanaman Modal Aceh 2022 yang berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga menyadari, laporan ini masih dapat ditingkatkan, baik dalam pengumpulan data, analisa, maupun penulisan laporannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran bersifat konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan pada masa akan datang.

Demikian Laporan Hambatan Penanaman Modal Aceh 2022 ini disusun. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung peningkatan dan pemerataan penanaman modal di daerah, sekaligus mendukung Aceh sebagai salah satu destinasi penanaman modal unggulan di Indonesia.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita untuk berbagai inisiatif dan upaya membangun Aceh lebih baik melalui sektor penanaman modal. Aamiin.

Banda Aceh, 01 Agustus 2022
Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Kelayakan Terpadu Satu Pintu Aceh



Marzuki, S.H.

LAPORAN HAMBATAN PENANAMAN MODAL ACEH 2022

Pengarah

Marthunis, ST, DEA

Marzuki, SH

Penanggung Jawab

Rahmadhani, M.Bus

Ketua Penyunting/Penyusun

Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Sekretaris Penyunting/Penyusun

Firamitha K. Devi, S.STP, MM

Anggota Penyunting/Penyusun

Dian Eka Sari, SH

Dhiyaul Farhan M.Nur, SH, MH

Mira Suci Yana, S.Stat.

Muhammad Shidiq, S.Stat

Kontributor

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

Penyelarasa Tata Letak

CV. Three Power System

www.dpmptsp.acehprov.go.id

www.investaceh.id

    dpmptspaceh     investinaceh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-----	i
DAFTAR ISI -----	iii
DAFTAR GAMBAR-----	iv
BAB I PENDAHULUAN -----	I-1
1.1. Latar Belakang -----	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan -----	I-5
1.3. Identifikasi Hambatan Penanaman Modal Aceh-----	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM PENANAMAN MODAL ACEH -----	II-1
2.1. Kinerja Penanaman Modal Aceh Tahun 2017 -----	II-3
2.2. Kinerja Penanaman Modal Aceh Tahun 2018 -----	II-3
2.3. Kinerja Penanaman Modal Aceh Tahun 2019 -----	II-4
2.4. Kinerja Penanaman Modal Aceh Tahun 2020 -----	II-4
2.5. Kinerja Penanaman Modal Aceh Tahun 2021 -----	II-5
2.6. Kinerja Penanaman Modal Aceh Tahun 2022 -----	II-5
BAB III METODOLOGI PENELITIAN -----	III-1
3.1. Metode Pengambilan Sampel-----	III-1
3.2. Instrumen Survei-----	III-4
BAB IV PEMBAHASAN HASIL SURVEI HAMBATAN PENANAMAN MODAL -----	IV-1
4.1. Analisa Variabel Hambatan Penanaman Modal -----	IV-1
4.2. Potensi Penghambat Penanaman Modal di Aceh -----	IV-21
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI -----	V-1
5.1. Kesimpulan -----	V-1
5.2. Rekomendasi -----	V-3
LAMPIRAN -----	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Jumlah Investor (PMDN dan PMA) di Aceh Tahun 2016-2021 -----	II-2
Gambar 2.2. Realisasi Penanaman Modal (PMDN dan PMA) di Aceh Tahun 2016-2021 -----	II-3
Gambar 3.1. Distribusi Jumlah Perusahaan dan Jumlah Sampel berdasarkan Sektor -----	III-2
Gambar 3.2. Sebaran Sampel berdasarkan Kabupaten/Kota -----	III-3
Gambar 3.3. Sebaran Sampel berdasarkan Sektor -----	III-3
Gambar 3.4. Skala Likert yang Digunakan-----	III-4
Gambar 4.1. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) -----	IV-2
Gambar 4.2. Persepsi pelaku usaha tentang kualitas Sumber Daya Manusia lokal berdasarkan Wilayah Usaha -----	IV-3
Gambar 4.3. Persepsi pelaku usaha tentang kualitas Sumber Daya Manusia berdasarkan Sektor Usaha-- -----	IV-4
Gambar 4.4. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Aspek Masyarakat dan Lingkungan Sekitar (Keamanan dan Kenyamanan)-----	IV-6
Gambar 4.5. Dukungan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar (Keamanan dan Kenyamanan) berdasarkan Wilayah Usaha-----	IV-7
Gambar 4.6. Dukungan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar (Keamanan dan Kenyamanan) berdasarkan Sektor Usaha -----	IV-8
Gambar 4.7. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur -----	IV-9
Gambar 4.8. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur berdasarkan Wilayah Tempat Usaha -----	IV-10

Gambar 4.9. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur berdasarkan Sektor Usaha ---- IV-11

Gambar 4.10. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Aspek Regulasi dan Administrasi
Pemerintah ----- IV-13

Gambar 4.11. Regulasi dan Administrasi Pemerintah berdasarkan Wilayah Usaha --- IV-14

Gambar 4.12. Regulasi dan Administrasi Pemerintah berdasarkan Sektor Usaha ----- IV-15

Gambar 4.13. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Aspek Penggunaan Bahan Baku
Lokal ----- IV-16

Gambar 4.14. Penggunaan Bahan Baku Lokal berdasarkan Wilayah Usaha ----- IV-17

Gambar 4.15. Penggunaan Bahan Baku Lokal berdasarkan Sektor Usaha ----- IV-18

Gambar 4.16. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Aspek Kondisi Pasar ----- IV-19

Gambar 4.17. Kondisi Pasar berdasarkan Wilayah Usaha ----- IV-20

Gambar 4.18. Kondisi Pasar berdasarkan Sektor Usaha ----- IV-20

Gambar 4.19. Kondisi Keseluruhan Variabel Hambatan Penanaman Modal ----- IV-22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Investasi atau penanaman modal menjadi salah satu penggerak perekonomian di suatu daerah. Penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang dapat dimanifestasikan pada suatu daerah akan berdampak positif dalam mendukung pergerakan laju pertumbuhan ekonomi, dan juga akan berdampak positif pada penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan usaha baru bagi masyarakat serta penyerapan tenaga kerja. Penanaman modal juga akan berperan dalam mendorong memperkuat struktur dan kemandirian ekonomi daerah, menciptakan populasi industri di daerah dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial-ekonomi lainnya.

Kegiatan penanaman modal melalui peran dan pelibatan swasta juga sangat menentukan dalam mendukung peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor penting lainnya, seperti pengembangan sektor industri dan perdagangan. Pengembangan ini juga akan memberikan ruang untuk sektor industri jasa lainnya untuk berkembang lebih baik, seperti UMKM di Aceh yang selama ini masih tertinggal jauh bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh bersama dengan pemangku kepentingan terkait terus melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka menarik minat penanam modal atau investor, baik PMDN, maupun PMA untuk melakukan penanaman modal di Aceh dengan berbagai daya tarik penanaman modal, termasuk juga kemudahan berusaha lainnya (*eases of doing business*).

Dengan demikian, Aceh tidak hanya maju dan berkembang secara ekonomi, namun juga tampil sebagai salah satu destinasi penanaman modal unggulan di Indonesia dengan menerapkan prinsip penanaman modal yang ramah lingkungan atau "*green investment*". Kebijakan ini selaras dengan salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026, yaitu "optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, pelestarian hutan, dan penanganan bencana." Pemerintah Aceh mendukung pembangunan Aceh dengan selalu mengedepankan semangat "*green investment*" atau "konsep investasi hijau" melalui prinsip-prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penanaman modal yang baik seharusnya mampu berkontribusi positif pada pembangunan ekonomi daerah. Namun, tanpa kerangka kebijakan pengaman atau *safeguard* yang baik dan terencana, penanaman modal akan membawa dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan dan kepunahan ekosistem flora dan fauna yang dilindungi. Bersamaan dengan hal tersebut, tren penanaman modal di sektor pembangunan berkelanjutan saat ini mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDG's)* dan *Environment, Social and Governance (ESG)* sebagai keutamaan melalui pelibatan semua pihak.

SDG's telah menjadi agenda global untuk mewujudkan kehidupan yang bebas kemiskinan, lingkungan yang terlindungi, kedamaian dan kemakmuran yang dapat dinikmati semua orang. Agenda SDG's yang terdiri atas 17 target diharapkan akan tercapai pada Tahun 2030 dengan 5 (lima) prinsip utama, yaitu *people, planet, prosperity, peace*, dan *partnership*.

Demikian juga, kegiatan penanaman modal tidak hanya sekedar bagaimana mendatangkan penanam modal atau *investor* untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha baru bagi masyarakat, tapi juga bagaimana mendukung terciptanya alih teknologi atau "*technology transfer*" dan meningkatnya ilmu pengetahuan dan SDM masyarakat melalui semangat revolusi industri 4.0. Pada gilirannya, penanaman modal dapat merestrukturisasi dan memperkuat struktur baru ekonomi daerah khususnya dan Indonesia umumnya. Salah satu cara merestrukturisasi dan memperkuat ekonomi baru adalah melalui semangat digitalisasi.

Di tengah sikap pesimis sebagian masyarakat Aceh tentang kurangnya minat investor berinvestasi di Aceh, ternyata kondisi kegiatan penanaman modal di Aceh masih relatif baik. Kinerja penanaman modal Aceh selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami perbaikan yang cukup baik juga. Realisasi penanaman modal Aceh telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022. Tahun 2021 realisasi penanaman modal Aceh berhasil mencapai Rp. 10,9 triliun. Capaian tersebut sebesar 163,90 persen melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJM Aceh 2017-2022, yaitu sebesar Rp. 6,65 triliun. Sementara, secara nasional pencapaian target realisasi penanaman modal Aceh mencapai 201,84 persen dari target yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia sebesar Rp. 5,4 triliun.

Capaian realisasi penanaman modal tersebut meningkat dibandingkan Tahun 2020 sebanyak Rp. 9,11 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 6,05 triliun. Sementara itu, target realisasi penanaman modal Tahun 2022 sebesar Rp. 7,3 triliun. Target ini diperkirakan akan tercapai, mengingat realisasi pada TW I s.d III Tahun 2022 berhasil mencapai Rp. 4,69 triliun atau 64,31 persen. Pencapaian ini menjadi salah satu indikator penting bahwa iklim penanaman modal di Aceh semakin membaik melalui dukungan semua pihak.

Namun, kegiatan penanaman modal di Aceh belum memberikan dampak positif secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara peningkatan dan percepatan, maupun pemerataan dalam berinvestasi di Aceh. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala dan persoalan teknis lainnya yang diperkirakan menjadi faktor penghambat kehadiran dan keberlangsungan penanaman modal di Aceh. Faktor-faktor tersebut perlu diidentifikasi dan dievaluasi untuk mengetahui kendala dan hambatan apa saja yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan/perseorangan untuk tetap berusaha di Aceh. Hasil identifikasi yang dilakukan akan menjadi dasar pengambilan kebijakan/keputusan untuk menghasilkan berbagai solusi terhadap faktor-faktor yang menghambat kemajuan penanaman modal di Aceh.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), setidaknya ada lima kendala yang sering dihadapi investor dalam berinvestasi di Indonesia yang membuat minat penanaman modal asing ke Indonesia menurun. Lima kendala tersebut, yaitu: (1) regulasi berbelit; (2) akuisisi lahan yang sulit; (3) infrastruktur publik yang belum merata; (4) pajak dan insentif non fiskal lain yang tidak mendukung penanaman modal; dan (5) tenaga kerja terampil yang belum memadai (vivanews.com, 15 September 2019).

Beberapa persoalan yang terjadi di atas juga sedang dihadapi oleh Aceh, khususnya menyangkut regulasi, akuisisi lahan, ketersediaan infrastruktur publik, insentif dan kebutuhan tenaga kerja terampil. Beberapa persoalan tersebut menjadi penghambat dan akan berdampak negatif pada upaya Pemerintah Aceh dalam membangun pencitraan positif tentang Aceh sebagai destinasi penanaman modal unggulan. Berbagai persoalan tersebut perlu diidentifikasi dan dievaluasi. Selanjutnya berbagai hambatan dan kendala yang menghambat tersebut dicarikan upaya dan langkah kebijakan untuk mencegahnya, mengatasinya, menghilangkan, dan atau mengurangnya. Semua ini diharapkan akan mendorong daya saing penanaman modal Aceh, terutama dalam mendorong ekspor dan meningkatkan realisasi penanaman modal Aceh.

Identifikasi dan evaluasi berbagai faktor kendala yang menghambat kegiatan penanaman modal di daerah dilakukan melalui kegiatan survei dalam bentuk kuesioner hambatan penanaman modal di Aceh dengan sampel perusahaan PMDN dan PMA yang sedang beroperasi di Aceh dan dipilih secara acak (random) melalui metode sampling probabilitas atau *probability sampling* dengan mempertimbangkan *margin of error (MOE)* yang dapat diterima.

Kuesioner Hambatan Penanaman Modal di Aceh berisikan 6 (enam) variabel, meliputi: *1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), 2. Masyarakat dan Lingkungan sekitar (Keamanan dan Kenyamanan), 3. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur, 4. Regulasi dan Administrasi Pemerintah, 5. Penggunaan Bahan Baku Lokal, dan 6. Kondisi Pasar.*

Setiap variabel memiliki sejumlah indikator masing-masing yang diminta penilaiannya pada responden dengan memilih satu pilihan pada skala Likert. Untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin, beberapa pertanyaan terbuka juga diajukan dalam kuesioner tersebut.

Untuk memperoleh hasil yang baik dan akurat melalui kegiatan survei hambatan penanaman modal di daerah, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (P2IPM), DPMPTSP Aceh bekerjasama dengan *Institute for Statistics and Socio-Ecological Development* (ISSED), dan sejumlah tenaga teknis dari Universitas Syiah Kuala (USK), termasuk juga mahasiswa magang dari Jurusan Statistika FMIPA USK di DPMPTSP Aceh.

Hasil survei inilah yang menjadi bahan utama penulisan Laporan Hambatan Penanaman Modal Aceh Tahun 2022 yang berisikan faktor-faktor kendala dan penghambat kegiatan penanaman modal Aceh. Hasil survei ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi penting yang ditujukan kepada pembuat kebijakan di daerah dalam rangka mendukung peningkatan, percepatan dan pemerataan kegiatan penanaman modal serta menciptakan ekosistem penanaman modal yang sehat dan kondusif di Aceh, sekaligus mendukung Aceh sebagai salah satu destinasi penanaman modal unggulan di Indonesia.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Laporan Hambatan Penanaman Modal Aceh 2022 bermaksud untuk menyediakan dasar bagi kebijakan penyelesaian berbagai faktor penghambat penanaman modal di Aceh melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mendukung sektor penanaman modal di daerah, khususnya para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum lainnya. Laporan ini sekaligus dimaksudkan untuk mendukung penciptaan iklim penanaman modal di Aceh yang lebih kondusif bagi para penanam modal.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Hambatan Penanaman Modal Aceh 2022 meliputi:

1. Menjalin komunikasi dan memperkuat kerjasama/jaringan (*networking*) dengan penanam modal yang sedang melakukan usahanya di Aceh, sekaligus mendukung peningkatan dan percepatan penanaman modal di daerah;
2. Melakukan identifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan penghambat penanaman modal di Aceh dan sejauh mana faktor-faktor penghambat tersebut dapat diantisipasi dan ditangani bersama;
3. Melakukan identifikasi solusi masalah yang menghambat penanaman modal Aceh melalui pelibatan pemangku kepentingan terkait, khususnya para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi Aceh, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum lainnya;
4. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan penanaman modal pada tahun 2022; dan
5. Menyediakan data dan informasi bagi Penanam Modal atau *investor* tentang Rencana Pengembangan Penanaman Modal dalam rangka penguatan koordinasi dan percepatan realisasi penanaman modal di Aceh.

1.3. Identifikasi Hambatan Penanaman Modal Aceh

Bila kita memperhatikan kondisi riil di Aceh, kegiatan penanaman modal belum memberikan dampak positif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, baik dilihat dalam peningkatan, percepatan, maupun pemerataan dalam berinvestasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dan persoalan yang menjadi faktor penghambat utama. Beberapa faktor penghambat yang telah teridentifikasi sebelumnya meliputi: *kerentanan politik dan keamanan, ukuran pasar lokal yang relatif kecil, hukum dan peraturan yang belum sepenuhnya mendukung penanaman modal, tantangan stabilitas makro ekonomi, ketersediaan tenaga kerja terampil yang belum memadai, kualitas*

infrastruktur fisik yang belum merata, tarif pajak, biaya tenaga kerja yang kurang kompetitif, dan masalah akses pembiayaan dan akses lahan/tanah.

Faktor-faktor tersebut perlu diidentifikasi lebih lanjut dan perkembangannya dievaluasi dari waktu ke waktu, misalnya setiap tahun atau dua-tahunan, melalui keterlibatan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di sekitar lokasi usaha/investasi, termasuk juga aparat keamanan dan penegak hukum lainnya. Dengan diketahuinya faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan penghambat kegiatan penanaman modal, diharapkan dapat diantisipasi untuk mendapatkan solusi terbaik. Identifikasi dan evaluasi berbagai faktor kendala yang menghambat kegiatan penanaman modal di daerah dapat dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya kegiatan survei dalam bentuk kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan terkait, meliputi: *kualitas SDM, masyarakat dan lingkungan sekitar (keamanan dan kenyamanan), ketersediaan dan kualitas infrastruktur, regulasi dan administrasi pemerintah, penggunaan bahan baku lokal, dan kondisi pasar.*

Kuesioner yang telah dipersiapkan tersebut berisikan beberapa pertanyaan dan dikirim secara elektronik melalui email dan whatsapp kepada sampel acak pelaku usaha (PMDN dan PMA) yang sedang melakukan usahanya di Aceh. Selain dikirim secara elektronik, Tim DPMPTSP Aceh juga melakukan kunjungan dan wawancara langsung ke beberapa perusahaan PMDN dan PMA di beberapa kabupaten/kota.

Hasil survei ini menjadi Laporan Hambatan Penanaman Modal Aceh 2022 yang berisikan, tidak hanya faktor-faktor kendala dan penghambat kegiatan penanaman modal Aceh, tapi juga kesimpulan dan rekomendasi penting yang ditujukan kepada pembuat kebijakan di daerah dalam rangka mendukung peningkatan, percepatan dan pemerataan kegiatan penanaman modal di daerah, sekaligus mendukung Aceh sebagai salah satu destinasi penanaman modal unggulan di Indonesia.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENANAMAN MODAL ACEH

Peran swasta sangat penting dan menentukan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Peran penting tersebut adalah pada sektor penanaman modal yang akan membuka pintu industri, perdagangan, dan usaha lainnya. Pertumbuhan ini juga akan memberikan ruang yang luas untuk sektor jasa lainnya di Aceh, yang selama ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Berdasarkan data jumlah perusahaan penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal dan perkembangan penanaman modal di Aceh menunjukkan tren atau kondisi yang semakin membaik, walaupun jumlah penanam modal atau investor, baik skala nasional, maupun asing berada dalam kondisi fluktuatif.

Pada tahun 2016 jumlah penanam modal di Aceh dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 42 investor, namun kondisi tersebut terus menurun menjadi 29 investor pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 mulai meningkat kembali menjadi 70 investor dan menurun menjadi 61 investor pada tahun 2020. Di akhir tahun 2021, jumlah investor PMA berjumlah 56. Turunnya 5 investor akibat pandemi global Covid-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami penurunan dari 346 investor tahun 2016 menjadi 211 investor pada tahun 2018. Pada tahun 2019 mulai meningkat tajam dari 376 investor menjadi 1.162 investor pada tahun 2021.

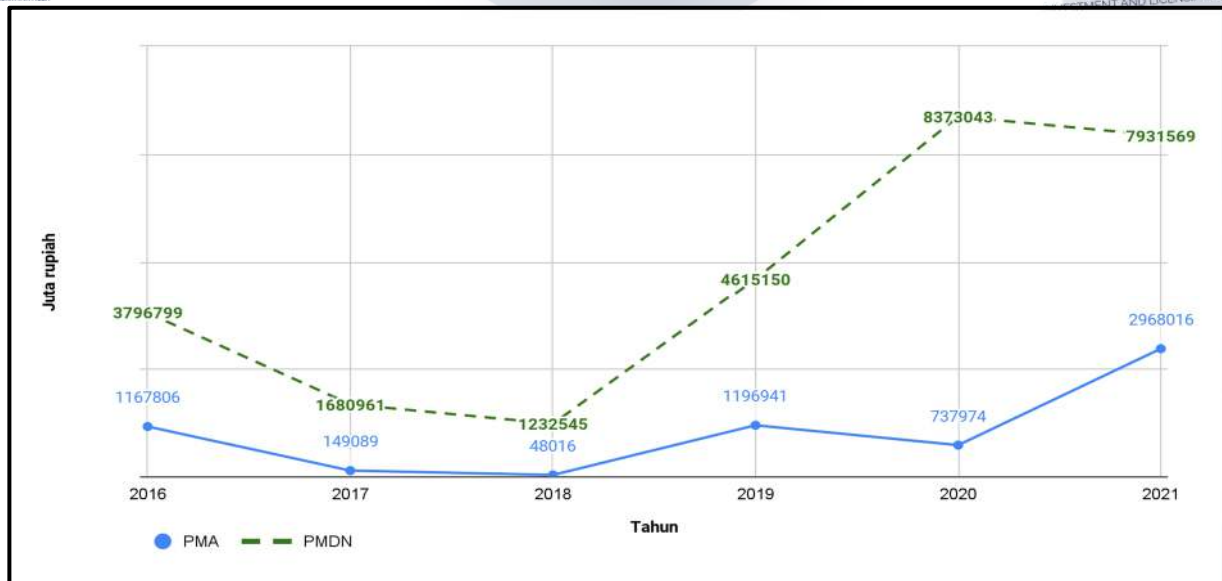


Sumber: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Aceh

Gambar 2.1. Jumlah Investor (PMDN dan PMA) di Aceh Tahun 2016-2021

Terkait dengan nilai penanaman modal yang terealisasi dari periode 2016 sampai 2021 mengikuti tren yang fluktuatif. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 terjadi penurunan dari 1,17 triliun Rupiah menjadi 48 Milyar Rupiah. Namun, kondisi realisasi penanaman modal membaik pada tahun 2019, meningkat menjadi 1,20 triliun Rupiah. Kemudian, menurun menjadi 737 Milyar Rupiah pada Tahun 2020 dan meningkat tajam menjadi 2,97 triliun Rupiah pada Tahun 2021.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami hal yang sama sebagaimana Penanaman Modal Asing (PMA). Pada Tahun 2016-2018 dengan besaran, yaitu 3,79 triliun Rupiah, 1,68 triliun Rupiah dan hanya 1,23 triliun Rupiah pada Tahun 2018. Namun terjadi peningkatan secara signifikan pada Tahun 2019, yaitu sebesar 4,61 triliun Rupiah dan 8,37 triliun Rupiah pada Tahun 2020. Ditutup sebesar 10,9 triliun Rupiah pada Tahun 2021.



Sumber: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Aceh

Gambar 2.2. Realisasi Penanaman Modal (PMDN dan PMA) di Aceh Tahun 2016-2021

2.1. Kinerja Penanaman Modal Aceh Tahun 2017

Jumlah Perizinan Berusaha dan Nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Aceh sebanyak 367 perizinan. Rasio daya serap tenaga kerja pada Tahun 2017 sebesar 1:38 dengan target 1:70, sehingga rasio capaian sebanyak 38,38 persen. Jumlah nilai realisasi penanaman modal Aceh mencapai Rp. 1,8 triliun dengan target realisasi penanaman modal Rp. 4.973.390.000.000,-, sehingga rasio capaian sebesar 52,32 persen. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), jumlah skor IKM yang diperoleh pada Tahun 2017 berjumlah 87,41 dengan target berjumlah 86,00, sehingga rasio capaian sebesar 101,64 persen.

2.2. Kinerja Penanaman Modal Aceh Tahun 2018

Jumlah Perizinan Berusaha dan Nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Aceh sebanyak 240 perizinan dengan target 559 perizinan, sehingga rasio capaian sebesar 42,93 persen. Rasio daya serap tenaga kerja pada Tahun 2018 sebesar 1:32 dengan target 1:60, sehingga rasio capaian sebanyak 32,07 persen. Jumlah nilai realisasi penanaman modal Tahun 2018 sebesar Rp. 1,2 triliun dengan target jumlah realisasi penanaman modal sebesar Rp. 5 triliun, sehingga rasio capaian sebesar

25,61 persen. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), jumlah skor IKM yang diperoleh pada Tahun 2018 berjumlah 85,57 dengan target berjumlah 86,50, sehingga rasio capaian sebesar 98,92 persen.

2.3. Kinerja Penanaman Modal Aceh Tahun 2019

Jumlah Perizinan Berusaha dan Nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Aceh sebanyak 446 perizinan dengan target 670 perizinan, sehingga capaian kinerja sebesar 66,56 persen. Rasio daya serap tenaga kerja pada Tahun 2019 sebesar 1:29 dengan target 1:65, sehingga rasio capaian sebanyak 29,14 persen. Jumlah nilai realisasi penanaman modal pada Tahun 2019 sebesar Rp. 5,8 triliun dengan target nilai realisasi penanaman modal sebesar Rp. 5,5 triliun, sehingga rasio capaian sebesar 105,67 persen. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), jumlah skor IKM yang diperoleh pada Tahun 2019 berjumlah 84,29 dengan target berjumlah 87,50 sehingga rasio capaian sebesar 96,33 persen.

2.4. Kinerja Penanaman Modal Aceh Tahun 2020

Jumlah Perizinan Berusaha dan Nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Aceh sebanyak 3.316 perizinan dengan target 805 perizinan, sehingga rasio capaian sebesar 411,93 persen. Rasio daya serap tenaga kerja pada Tahun 2020 sebesar 1:17 dengan target 1:70, sehingga rasio capaian sebanyak 17,56 persen. Jumlah nilai realisasi penanaman modal pada Tahun 2020 sebesar Rp. 9,1 triliun dengan target nilai realisasi penanaman modal sebesar Rp. 6 triliun, sehingga rasio capaian sebesar 150,60 persen. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), jumlah skor IKM yang diperoleh pada Tahun 2020 berjumlah 86,82 dengan target berjumlah 88,50, sehingga rasio capaian sebesar 98,10 persen.

2.5. Kinerja Penanaman Modal Aceh Tahun 2021

Jumlah Perizinan Berusaha dan Nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Aceh sebanyak 3.328 perizinan dengan target 965 perizinan, sehingga rasio capaian sebesar 278,34 persen. Rasio daya serap tenaga kerja mencapai sebesar 1:12 dengan target 1:75, sehingga rasio capaian sebanyak 6,96 persen. Jumlah nilai realisasi penanaman modal pada tahun 2021 sebesar Rp. 10,90 triliun dengan target nilai realisasi penanaman modal sebesar Rp. 6,65 triliun, sehingga rasio capaian sebesar 127,20 persen. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), jumlah skor IKM yang diperoleh pada Tahun 2021 berjumlah 87,34 dengan target berjumlah 89,50, sehingga rasio capaian sebesar 97,64 persen.

2.6. Kinerja Penanaman Modal Aceh Tahun 2022

Jumlah Perizinan Berusaha dan Nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Aceh sampai triwulan III sebanyak 5.155 perizinan, sedangkan rencana penggunaan tenaga kerja sampai dengan Bulan Juli 2022 sebanyak 14.950 orang. Jumlah nilai realisasi penanaman modal sampai dengan triwulan ketiga tahun 2022 sebesar Rp. 4,69 triliun dengan target nilai realisasi penanaman modal Tahun 2022 sebesar Rp. 7,3 triliun, sehingga rasio capaian sebesar 64,31 persen. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), jumlah skor IKM yang diperoleh pada semester I tahun 2022 berjumlah 87,76.

Meskipun realisasi dan iklim penanaman modal di Aceh semakin meningkat dan membaik setiap tahunnya, ada berbagai kendala serius lainnya yang masih dihadapi oleh pihak perusahaan, yang pada akhirnya akan menghambat kemajuan perusahaan yang sedang beroperasi di daerah. Berbagai kendala tersebut menjadi perhatian dan tanggung jawab Pemerintah dan semua pemangku kepentingan dunia usaha dan dunia industri di Aceh untuk mencari solusi terbaik dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum bagi setiap penanam modal yang sedang melakukan usahanya di Aceh.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Pengambilan Sampel

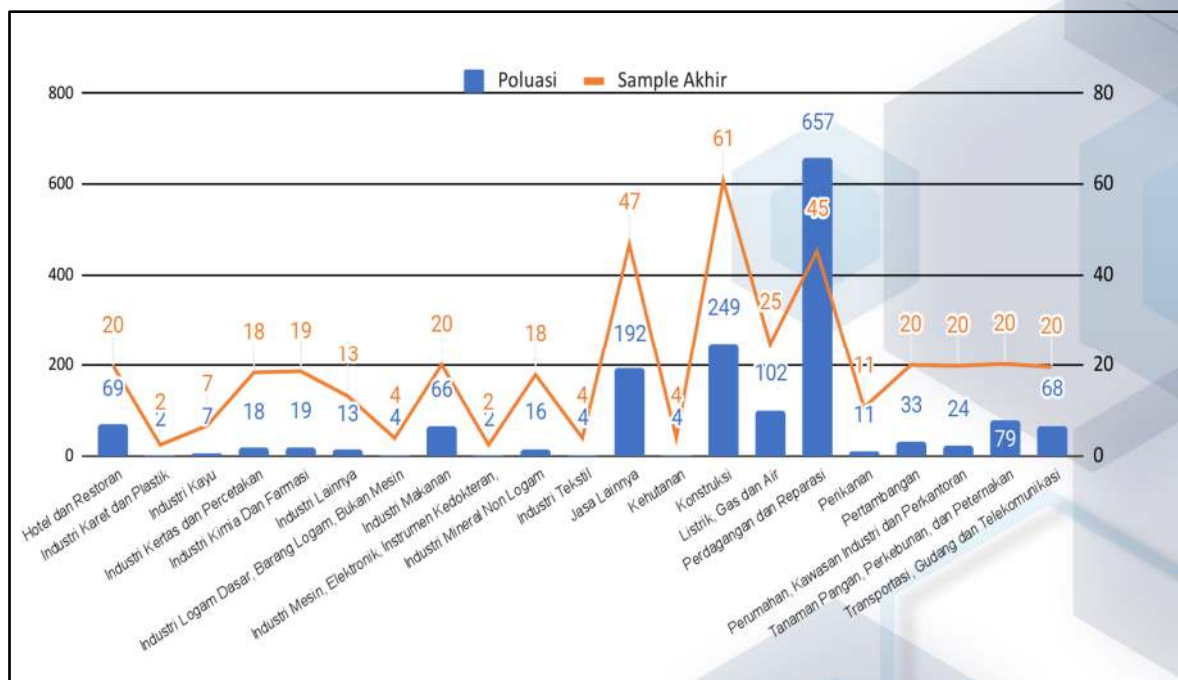
Target Populasi dari survei ini adalah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang beroperasi di Aceh, yang terdiri dari 21 sektor usaha, antara lain: *Hotel dan Restoran; Industri Karet dan Plastik; Industri Kayu; Industri Kertas dan Percetakan; Industri Kimia dan Farmasi; Industri Lainnya; Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; Industri Makanan; Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam; Industri Mineral Non Logam; Industri Tekstil; Jasa Lainnya; Kehutanan; Konstruksi; Listrik, Gas dan Air; Perdagangan dan Reparasi; Perikanan; Pertambangan; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran; Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan; serta Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi.*

Dari 1639 perusahaan yang terdaftar di Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), 400 perusahaan dipilih secara acak sebagai sampel dalam survei ini. Sampel acak dipilih dengan memperhatikan sektor usaha dan sebaran wilayah, dimana target pada setiap sektor terdapat sampel acak sebagai perwakilan. Sampel yang dipilih secara acak menggunakan *Stratified Random Sampling* berdasarkan sektor usaha.

Dari 1639 perusahaan, ditargetkan 312 perusahaan dapat menjadi responden. Sampel sebesar ini diperoleh dengan menggunakan perhitungan *Margin of Error* (MOE) sebesar 5 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan mengirimkan link pengisian kuesioner secara daring, baik dengan menggunakan *whatsapp*, maupun *email* kepada responden yang mewakili sampel acak terpilih. Selain itu, beberapa pelaku usaha juga diminta kesediaannya untuk mengisi kuesioner secara langsung dan sukarela dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan di beberapa kabupaten/kota, seperti Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.

Untuk mengantisipasi adanya formulir gagal serta adanya responden (pelaku usaha) yang tidak memberi tanggapan, maka penyebaran kuesioner dilakukan untuk 400 sampel perusahaan terpilih. Penyebaran kuesioner dilakukan dari tanggal 6 Juni sampai dengan 31 Juli 2022. Dari 400 perusahaan yang dihubungi, hanya 209 perusahaan yang memberi tanggapan terhadap kuesioner ini dengan *response rate*-nya sekitar 50 persen.

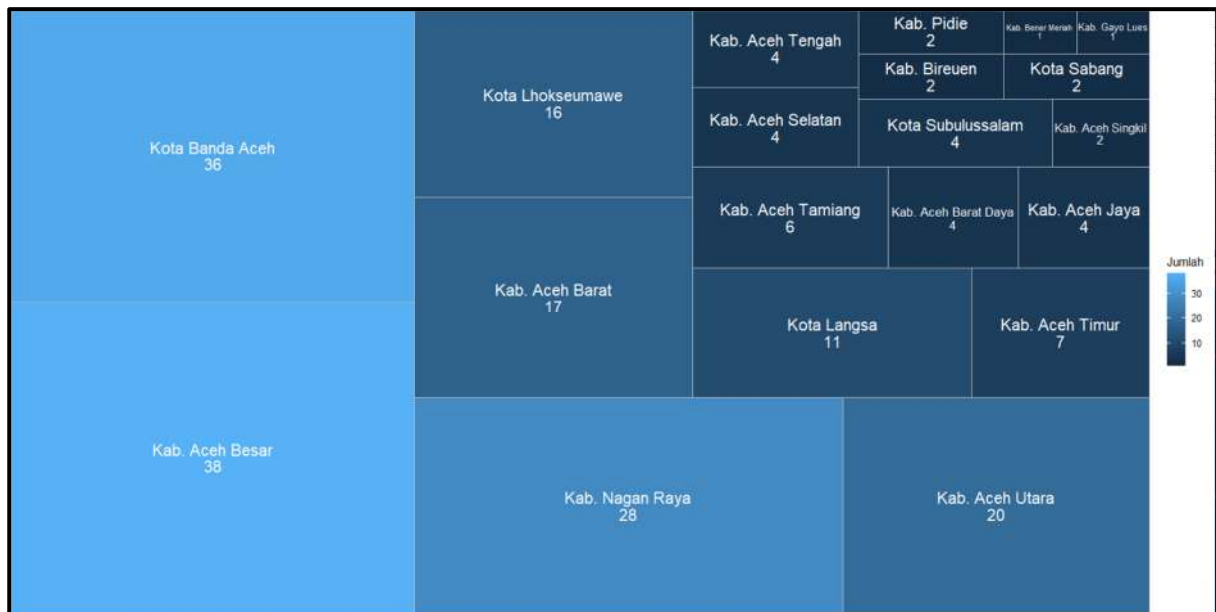
Gambar 3.1 menunjukkan jumlah perusahaan dan jumlah sampel yang ingin dicapai dalam perancangan survei berdasarkan sektor usaha. Dapat dilihat juga, bahwa perusahaan pada sektor Perdagangan dan Reparasi merupakan sektor yang paling dominan. Terdapat beberapa kriteria tambahan dalam penentuan sampel, yaitu setiap sektor yang memiliki populasi kurang dari 20, maka semua populasi tersebut akan dijadikan sampel. Populasi yang lebih dari 20 akan diambil minimal 20 sampel per masing-masing sektor.



Gambar 3.1. Distribusi Jumlah Perusahaan dan Jumlah Sampel berdasarkan Sektor

Responden yang diperoleh tersebar di 21 sektor dan 20 kabupaten/kota, sementara 3 (tiga) kabupaten lainnya tidak memberi respon yang meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tenggara dan Simeulue. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.2 yang menunjukkan bahwa responden didominasi secara proporsional oleh perusahaan yang

berlokasi di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan pada Gambar 3.3 menunjukkan bahwa berdasarkan sektor, juga secara proporsional, didominasi oleh perusahaan konstruksi—sektor usaha yang terbesar di Aceh. Hal ini sesuai dengan sampel yang dihubungi, dimana konstruksi menjadi sektor dengan jumlah perusahaan terbanyak.



Gambar 3.2. Sebaran Sampel berdasarkan Kabupaten/Kota



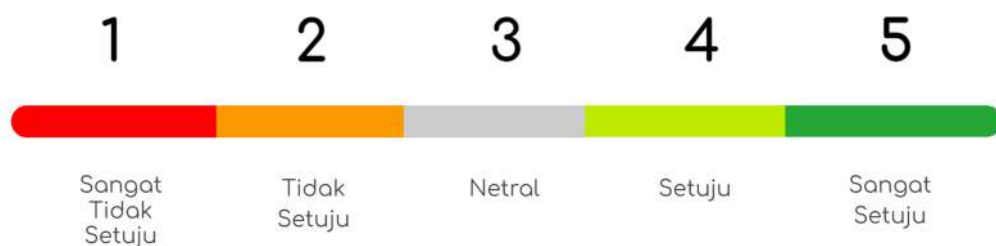
Gambar 3.3. Sebaran Sampel berdasarkan Sektor

3.2. Instrumen Survei

Survei ini dilaksanakan sebagai salah satu strategi DPMPTSP Aceh menjalin komunikasi dengan pelaku usaha yang ada di Aceh dengan tujuan untuk mengamati berbagai hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha selama melakukan kegiatan usahanya di Aceh. Diharapkan survei ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan penghambat kegiatan penanaman modal. Berdasarkan studi literatur dan pembahasan mendalam (*in-depth discussion*), terdapat 6 (enam) variabel hambatan penanaman modal yang diukur dalam survei ini, meliputi:

1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Masyarakat dan lingkungan sekitar (keamanan dan kenyamanan),
3. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur;
4. Regulasi dan administrasi pemerintah;
5. Penggunaan bahan baku lokal; dan
6. Kondisi pasar.

Faktor-faktor tersebut diukur dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Untuk pertanyaan tertutup, terdiri dari 35 pertanyaan indikator hambatan penanaman modal dari 6 (enam) variabel dengan menggunakan skala likert dalam 5 tingkatan skor seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.4. Skor 1 diberikan jika pelaku usaha “sangat tidak setuju” dengan pernyataan yang ada pada instrumen, skor 2 untuk “tidak setuju”, 3 untuk “netral”, 4 untuk “setuju”, dan 5 jika pelaku usaha “sangat setuju” dengan pernyataan yang ada pada instrumen. Instrumen survei dapat dilihat pada lampiran 1.



Gambar 3.4. Skala Likert yang Digunakan

Sebelum kuesioner disebarakan secara luas kepada 400 pelaku usaha yang terpilih sebagai sampel acak, terlebih dahulu dilakukan pengujian awal atau *pilot study* terhadap 25 perusahaan terpilih yang melakukan usaha di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. *Pilot study* ini bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen yang digunakan. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode *korelasi pearson*, sedangkan untuk reliabilitas digunakan nilai *cronbach's alpha*. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam survei ini dapat mengukur variabel yang ingin diukur dan dapat dipertanggungjawabkan tingkat konsistensinya.

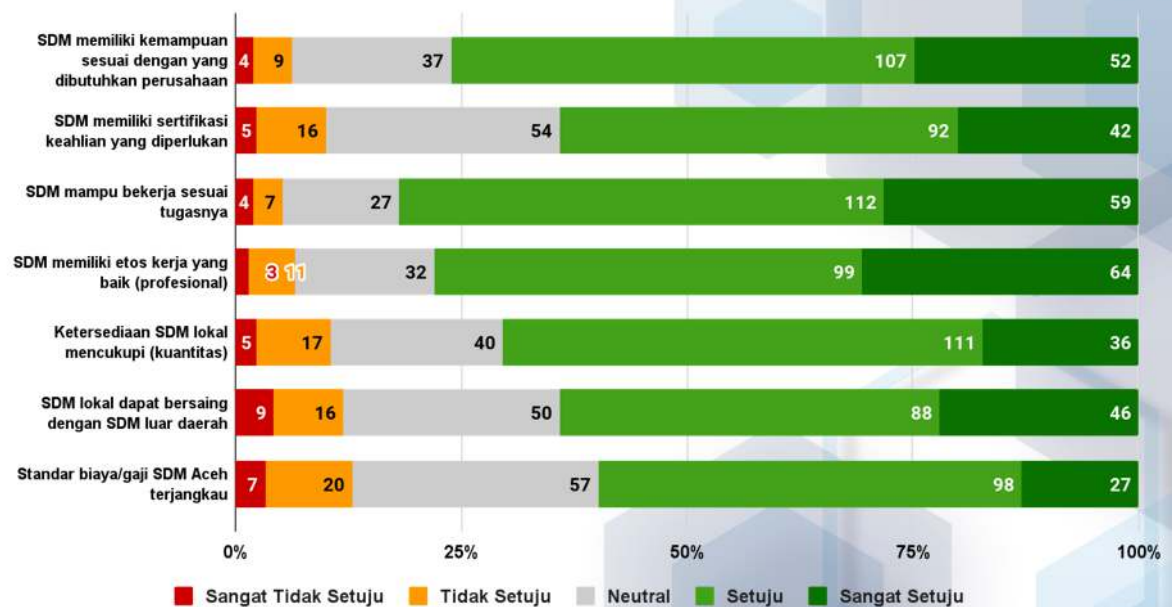
BAB IV

PEMBAHASAN HASIL SURVEI HAMBATAN PENANAMAN MODAL

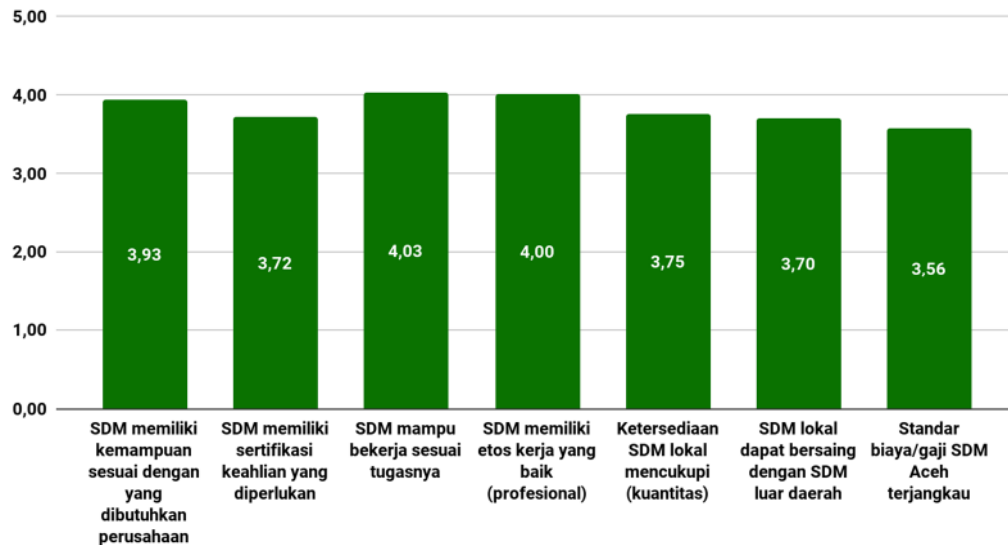
Hasil kuesioner yang diperoleh melalui survei menggunakan 6 (enam) variabel yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) indikator serta beberapa pertanyaan terbuka berkaitan dengan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan terpilih telah dilakukan pengkajian dan analisa mendalam. Hasil analisa keseluruhan dari 6 variabel tersebut menggambarkan bahwa masing-masing kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, baik dilihat dari aspek sektor usaha, maupun wilayah usaha dengan detail analisa hasil kuesioner hambatan sebagai berikut:

4.1. Analisa Variabel Hambatan Penanaman Modal

1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)



(a)



(b)

Gambar 4.1. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

(a) sebaran jawaban responden (b) skor rata-rata jawaban responden

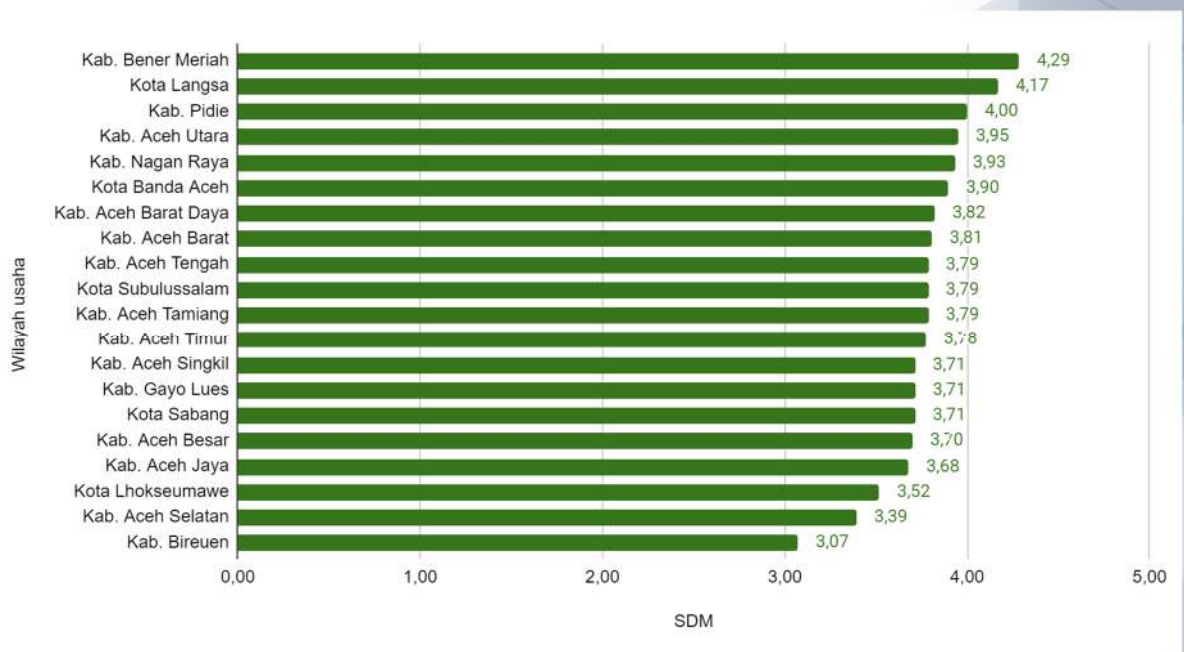
Berdasarkan Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa Variabel Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) menurut persepsi pelaku usaha dalam kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan banyak pelaku usaha setuju bahwa SDM yang tersedia memiliki etos kerja yang baik dan mampu bekerja sesuai dengan tugasnya, serta memiliki kemampuan dan sertifikasi keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Dari segi kuantitas, ketersediaan SDM lokal mencukupi kebutuhan, dan SDM lokal bahkan mampu bersaing dengan SDM luar daerah.

Sementara itu, dapat dilihat bahwa indikator standar gaji memiliki skor terendah 3,56, diikuti indikator kemampuan bersaing dengan SDM luar (3,70) dan indikator kuantitas SDM lokal (3,78). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa masalah terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, terutama pada standar gaji, keterampilan SDM lokal untuk bersaing dengan SDM luar daerah, dan ketersediaan SDM lokal. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi beberapa pelaku usaha, khususnya terkait dengan masih sulitnya mempekerjakan SDM lokal yang

berkompeten dan mampu bersaing dengan SDM luar daerah dengan standar gaji yang dapat dijangkau pengusaha.

Hal ini menjadi alasan pelaku usaha lebih memilih untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah dibandingkan menggunakan tenaga kerja lokal. Selain itu, masalah profesionalitas SDM lokal (komitmen dan tanggung jawab) sering menjadi salah satu permasalahan lainnya terkait penggunaan SDM lokal, sehingga sering berdampak terhadap produktivitas yang tidak maksimal.

Meskipun demikian, beberapa pelaku usaha masih merasa terbantu dengan keberadaan SDM lokal, namun perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan tenaga kerja, workshop, pemagangan, dll. Rata-rata skor persepsi pelaku usaha tentang kualitas SDM lokal di masing-masing wilayah survei dapat dilihat pada Gambar 4.2.



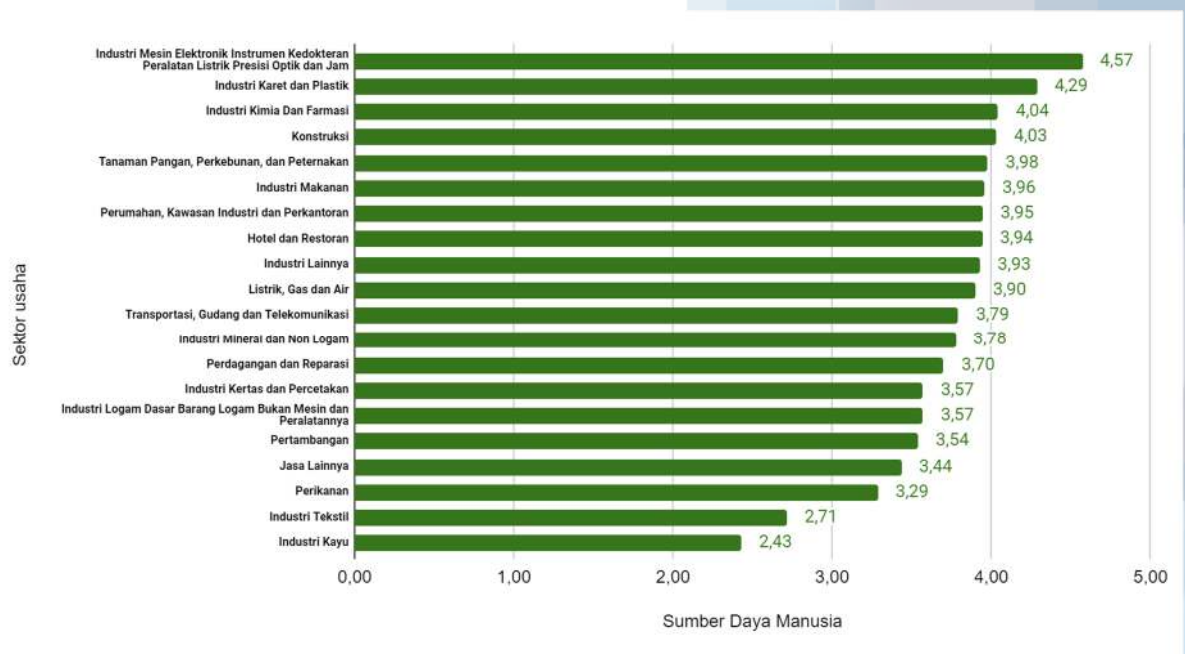
Gambar 4.2. Persepsi Pelaku Usaha tentang Kualitas Sumber Daya Manusia Lokal berdasarkan Wilayah Usaha

Berdasarkan Gambar 4.2, Kabupaten Bener Meriah menjadi wilayah usaha dengan kualitas SDM terbaik. Hal ini dapat dilihat dari wilayah Kabupaten Bener Meriah yang memperoleh rata-rata skor yang hampir sempurna, yaitu 4,29 dari skor maksimalnya

adalah 5. Sedangkan Kabupaten Bireuen memiliki rata-rata skor untuk Variabel Kualitas SDM terendah, yaitu 3,07. Beberapa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bireuen memiliki beberapa keluhan terkait kedisiplinan dan kemampuan/kompetensi SDM lokal yang masih terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penghambat pencapaian produktivitas perusahaan.

Permasalahan yang berbeda lainnya juga ditemukan di Kota Lhokseumawe, meliputi kedisiplinan, komitmen, dan tanggung jawab SDM yang ada. Berbeda halnya permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha di Kabupaten Aceh Utara, yang memiliki skor SDM yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe yang cenderung tidak memiliki masalah SDM lokal secara signifikan.

Sementara itu, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Tengah sebagai destinasi wisata unggulan di Aceh, memiliki permasalahan serupa lainnya, yaitu masih sulitnya meningkatkan SDM lokal untuk berkembang lebih baik. SDM lokal kedua daerah tersebut masih sulit untuk bekerjasama secara profesional, termasuk juga ketersediaan SDM sesuai standar kualitas perusahaan masih sangat terbatas.



Gambar 4.3. Persepsi Pelaku Usaha tentang Kualitas Sumber Daya Manusia berdasarkan Sektor Usaha

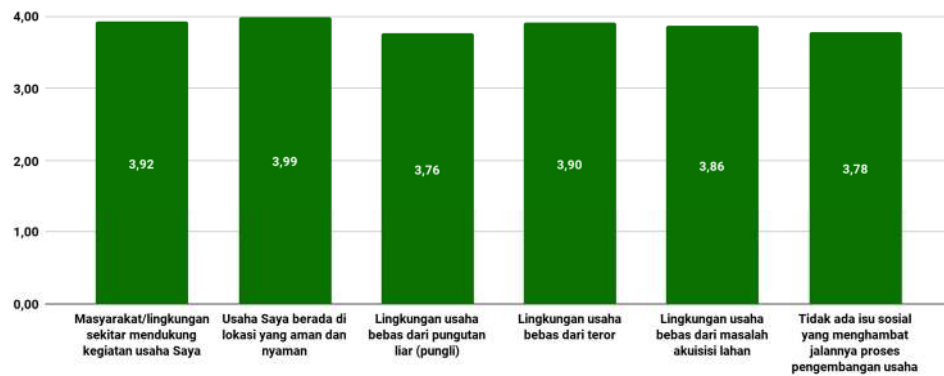
Berdasarkan penjelasan Gambar 4.3, dapat disimpulkan bahwa Sektor Industri Mesin Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi Optik dan Jam memiliki rata-rata skor tertinggi untuk Variabel Kebutuhan SDM, yaitu 4,57. Sedangkan Industri Kayu memiliki rata-rata skor terendah, yaitu 2,43. Permasalahan utama yang dihadapi sektor tersebut adalah kurangnya keahlian (skill) SDM lokal yang sesuai dengan standar perusahaan tersebut.

Sektor Konstruksi sebagai salah satu sektor dengan jumlah sampel terbanyak dengan 40 pelaku usaha, menghadapi permasalahan terkait kompetensi SDM yang ada, antara lain masih kurangnya tenaga lulusan teknik, biaya sertifikasi dan profesionalisme SDM perusahaan tersebut. Pihak pelaku usaha berharap adanya pelatihan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam upaya meningkatkan keahlian (skill), terutama bidang keahlian sektor pembangunan konstruksi.

2. Masyarakat dan Lingkungan Sekitar (Keamanan dan Kenyamanan)



(a)



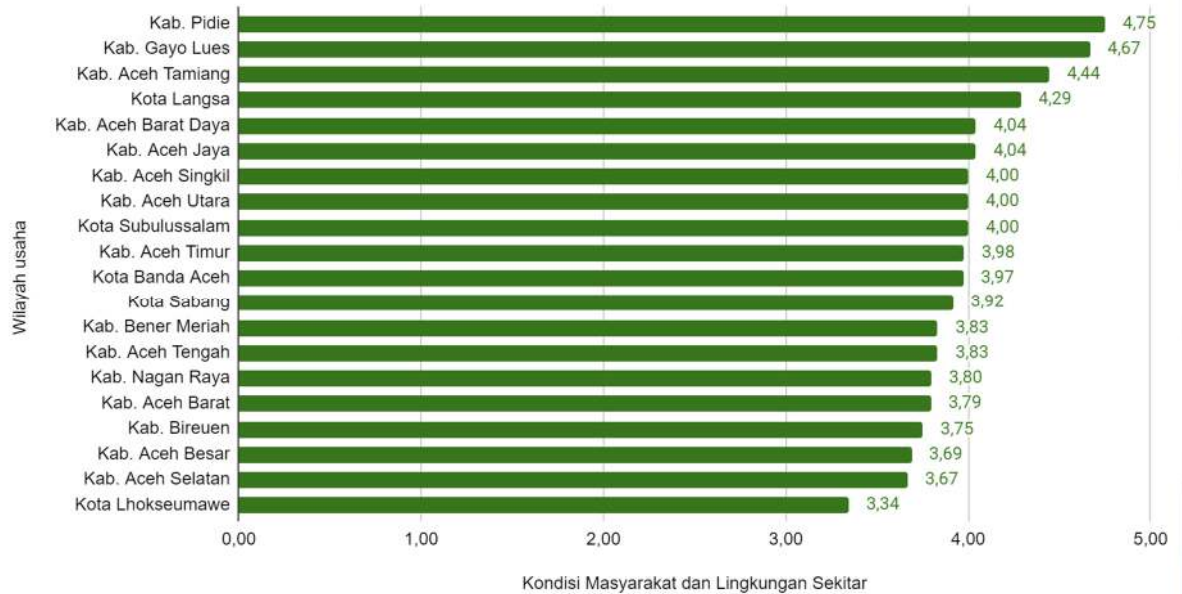
(b)

Gambar 4.4. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Aspek Masyarakat dan Lingkungan Sekitar (Keamanan dan Kenyamanan)

(a) sebaran jawaban responden (b) skor rata-rata jawaban responden

Berdasarkan beberapa indikator di atas pada Gambar 4.4, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa lokasi usaha yang nyaman dan aman memperlihatkan dukungan terhadap kelancaran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Sementara itu, dapat dilihat bahwa indikator lingkungan usaha bebas dari pungutan liar memiliki skor terendah, yaitu 3,76, diikuti oleh indikator isu sosial yang menghambat proses pengembangan usaha (3,78). Hal ini sejalan dengan permasalahan yang diutarakan oleh beberapa pelaku usaha, dimana masih adanya pungutan liar (pungli) dari oknum tertentu kepada pelaku usaha dengan dalih memperlancar usaha.

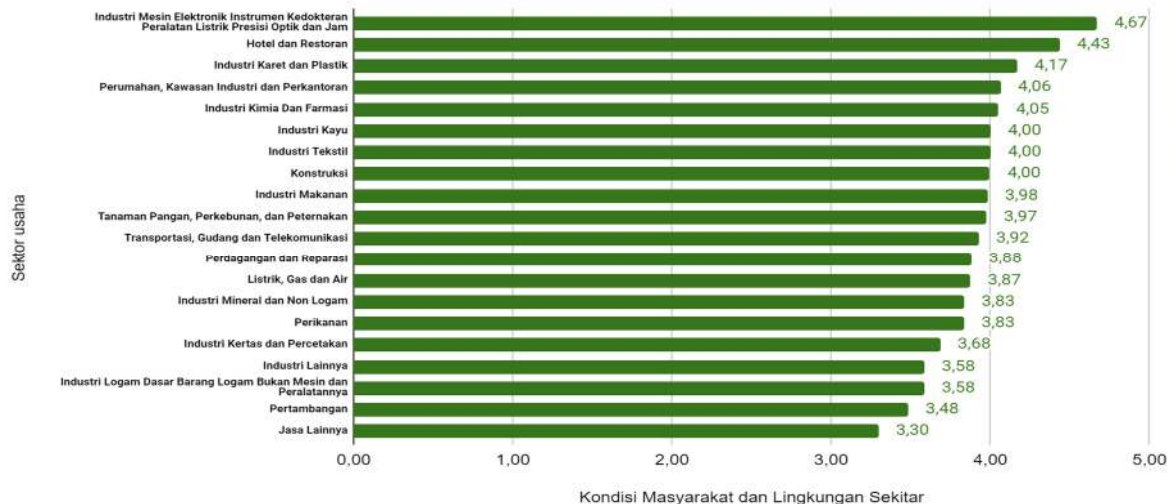
Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Banda Aceh, Aceh Besar, dan Lhokseumawe menjadi 3 wilayah teratas yang masih sering terjadi pungutan, seperti sumbangan kegiatan sosial, keagamaan, perayaan hari-hari besar, dll. Hal ini menjadi permasalahan yang akan berdampak pada kenyamanan pelaku usaha dalam berusaha di Aceh. Walaupun demikian, beberapa pelaku usaha tidak berkeberatan dengan adanya pungutan tersebut karena masih dalam tingkat wajar.



Gambar 4.5. Dukungan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar (Keamanan dan Kenyamanan) berdasarkan Wilayah Usaha

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, permasalahan yang terjadi terkait Variabel Dukungan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar (Keamanan dan Kenyamanan) berdasarkan wilayah usaha antara lain masih adanya pungutan liar yang sering terjadi di Kota Lhokseumawe dan oknum dari pemerintah yang memprovokasi persengketaan lahan antara pelaku usaha dan masyarakat. Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Besar, Bireuen, dan Kabupaten Aceh Barat juga harus memperbaiki dukungan keamanan dan kenyamanan berusaha di wilayahnya.

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bireuen terdapat permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha setempat dalam bentuk inefisiensi birokrasi dan nepotisme.



Gambar 4.6. Dukungan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar (Keamanan dan Kenyamanan) berdasarkan Sektor Usaha

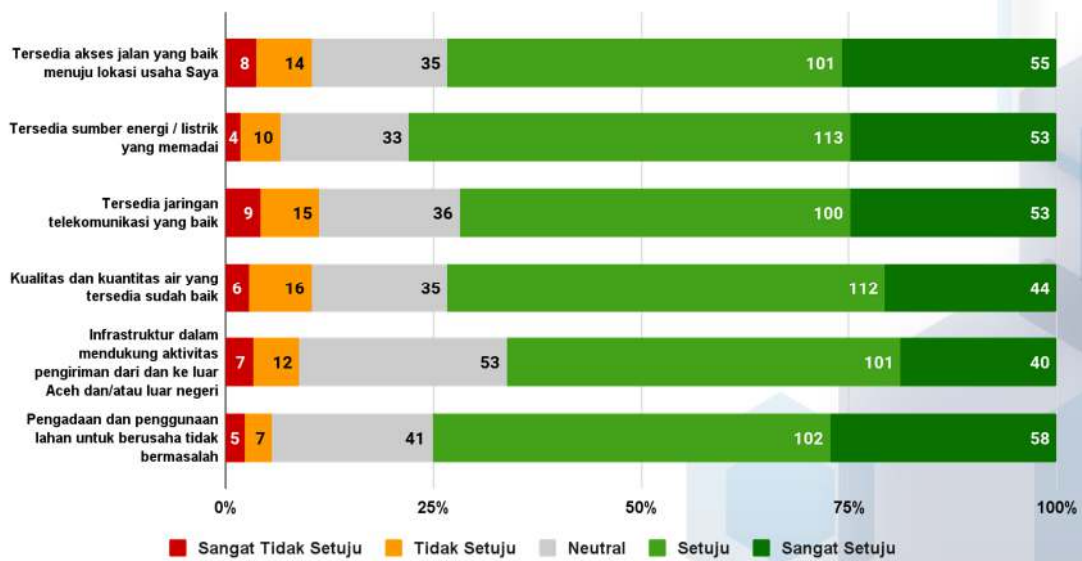
Berdasarkan penjelasan pada Gambar 4.6, dapat disimpulkan bahwa Sektor Industri Mesin Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi Optik dan Jam memiliki rata-rata skor tertinggi untuk Variabel Dukungan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar (Keamanan dan Kenyamanan) dengan rata-rata skor, yaitu 4,67. Sedangkan Sektor Jasa Lainnya memiliki rata-rata skor terendah, yaitu 3,30. Pada sektor tersebut permasalahan yang terjadi adalah keadaan sosial masyarakat di lokasi usaha yang merasa tidak aman dan nyaman, karena adanya pungli dengan alasan keamanan dan beberapa pelaku usaha mengalami kehilangan barang usahanya.

Sementara itu, pada Sektor Industri Karet dan Plastik permasalahan yang dihadapi, seperti masih adanya sengketa lahan yang dilakukan oleh oknum-oknum di lingkungan sekitarnya, terutama oknum pemerintah yang sengaja memprovokasi para pekerja dengan isu terkait masa pemakaian lahan usaha di kawasan tersebut sudah berakhir. Dengan demikian, para pekerja terpaksa berhenti bekerja di industri tersebut.

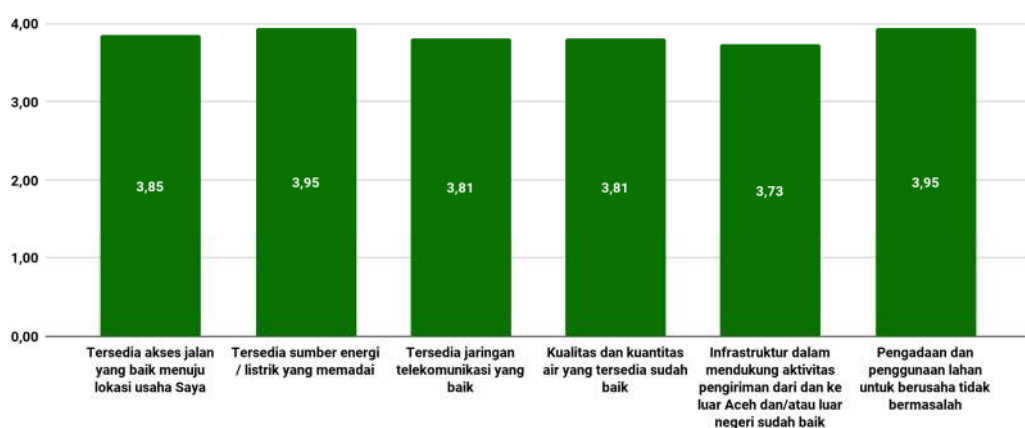
Di samping itu, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha sektor usaha industri listrik, gas, dan air adalah masih adanya pungutan liar (pungli). Pungli tersebut sering terjadi saat perusahaan mendatangkan barang atau alat kerja dari luar Aceh, dimana beberapa oknum meminta secara paksa mengangkut barang perusahaan dengan upah kerja yang relatif mahal.

Sebaliknya, masih banyak pelaku usaha yang memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar wilayah usahanya. Masyarakat merasa antusias karena para pelaku usaha memiliki kepedulian kepada lingkungan sekitarnya dengan membuka lapangan pekerjaan/usaha baru bagi masyarakat setempat, sehingga berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sekitarnya.

3. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur



(a)



(b)

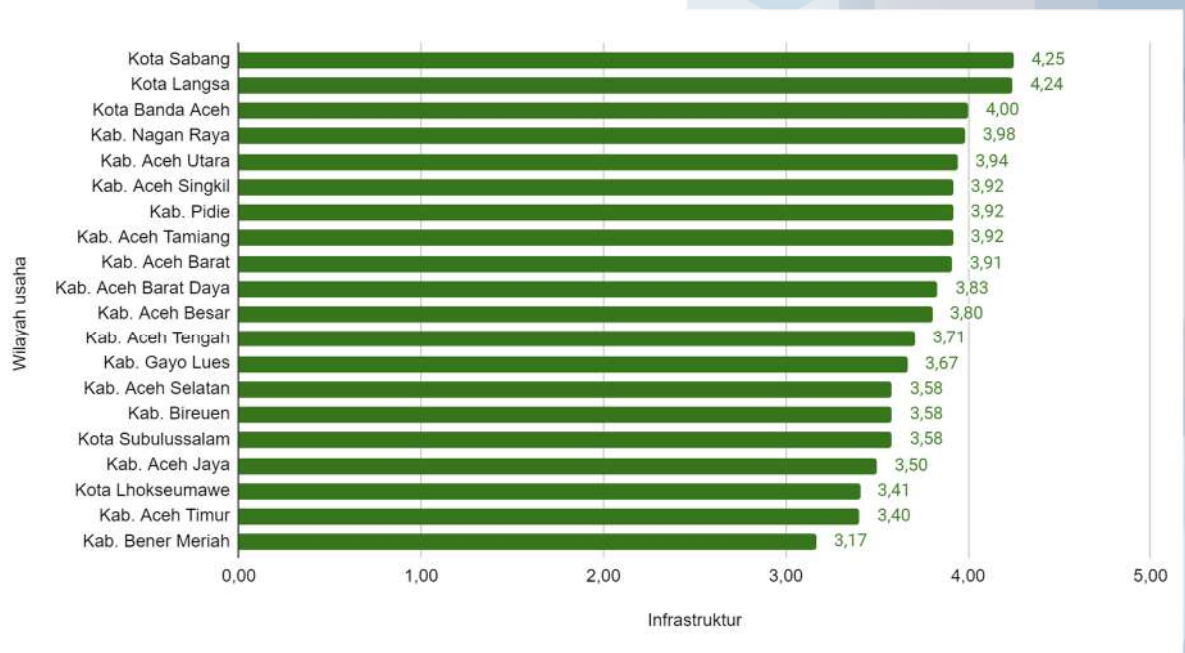
Gambar 4.7. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Aspek Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur

(a) sebaran jawaban responden (b) skor rata-rata jawaban responden

Berdasarkan beberapa indikator kuesioner pada Gambar 4.7, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Variabel Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur di Aceh sudah relatif memadai. Dari beberapa indikator dalam Variabel Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur, indikator infrastruktur yang mendukung aktivitas pengiriman *dari* dan *ke* Aceh dan/atau luar negeri (konektivitas) memiliki skor terendah, yaitu 3,73 dari skor maksimal 5. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa kendala yang dialami pelaku usaha terkait aktivitas ekspor-impor di daerah. Hal ini diakibatkan oleh infrastruktur pendukung untuk melakukan pengiriman, baik *dari* dan *ke* luar Aceh, maupun luar negeri masih terbatas.

Keterbatasan itu meliputi pelabuhan ekspor-impor yang masih sulit diakses dari beberapa wilayah usaha di Aceh, seperti pelabuhan di Kabupaten Aceh Barat. Permasalahan ini telah menghambat pelaku usaha untuk memasarkan produk-produk usaha. Dengan demikian, pelaku usaha di Aceh berharap agar ketersediaan infrastruktur pendukung aktivitas ekspor-impor dapat segera dibangun.

Selain itu infrastruktur jalan usaha dan penyediaan infrastruktur utilitas, seperti air dan telekomunikasi juga perlu terus ditingkatkan.

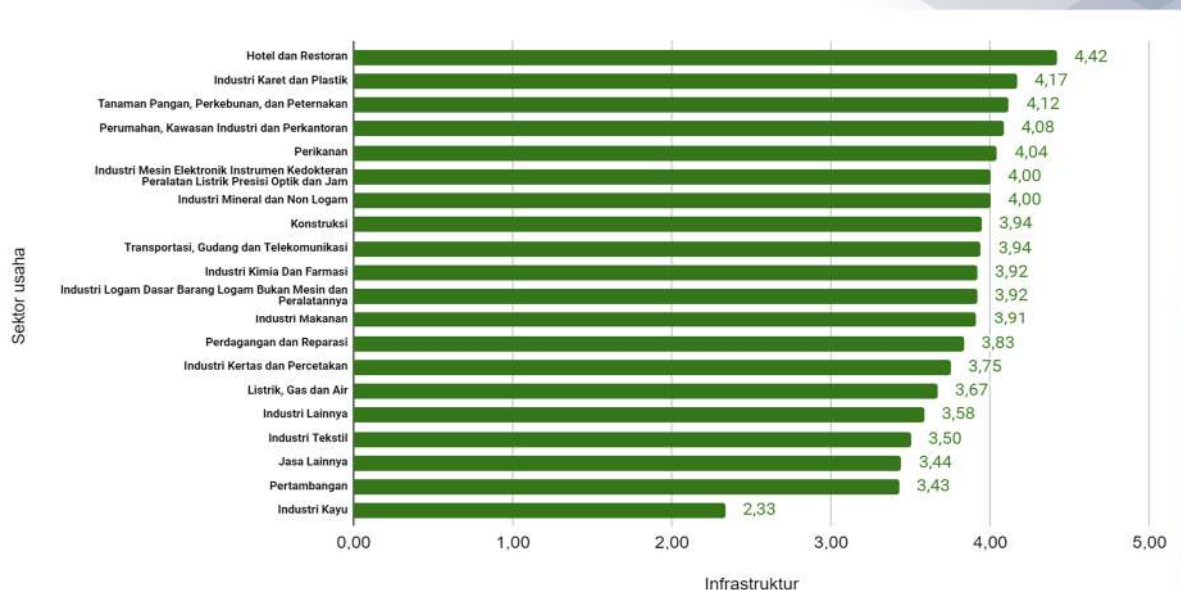


Gambar 4.8. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur berdasarkan Wilayah Tempat Usaha

Berdasarkan penjelasan pada Gambar 4.8, pada umumnya pelaku usaha di Aceh memiliki permasalahan yang sama, yaitu kualitas akses jalan dan penerangan lampu jalan. Banyak jalan yang menghubungkan wilayah non-perkotaan dan penerangan lampu jalan masing-masing berada dalam kondisi kurang memadai.

Kota Sabang memiliki rata-rata skor yang tertinggi untuk variabel ketersediaan dan kualitas infrastruktur, yaitu 4,25 dari skor maksimal 5. Meskipun demikian, para pelaku usaha di Kota Sabang sebagai salah satu destinasi wisata terkenal di Aceh masih mengeluh tentang kondisi infrastruktur, khususnya jalan yang menghubungkan ke berbagai daya tarik wisata. Sampai saat ini banyak ruas jalan ditumbuhi pepohonan yang rantingnya menjulur. Kondisi ini akan membahayakan keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan atau wisatawan.

Sebaliknya, Kabupaten Bener Meriah memiliki rata-rata skor yang paling rendah, yaitu 3,17. Permasalahan yang dihadapi juga terkait kualitas akses jalan. Hal yang sama juga terjadi di Kota Lhokseumawe, dimana akses jalan yang berada jauh dari pusat perkotaan membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah. Namun, bila ditinjau secara keseluruhan, tidak ada perbedaan signifikan rata-rata skor pada setiap kabupaten/kota di Aceh. Hal ini membuktikan bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur di Aceh pada umumnya berada dalam kondisi cukup merata.

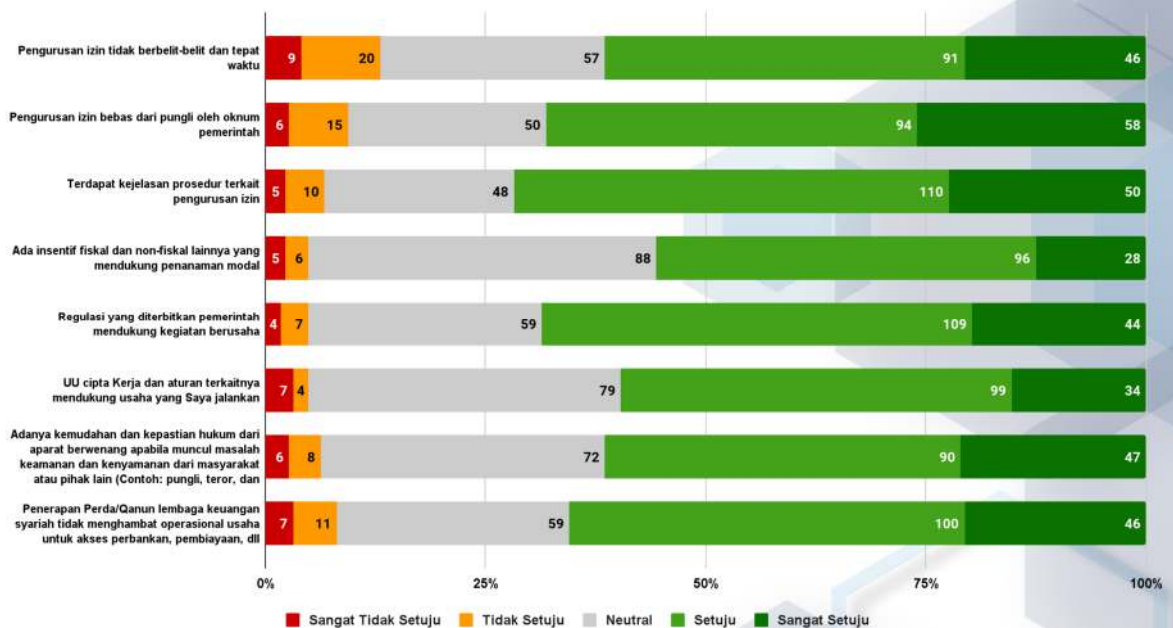


Gambar 4.9. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur berdasarkan Sektor Usaha

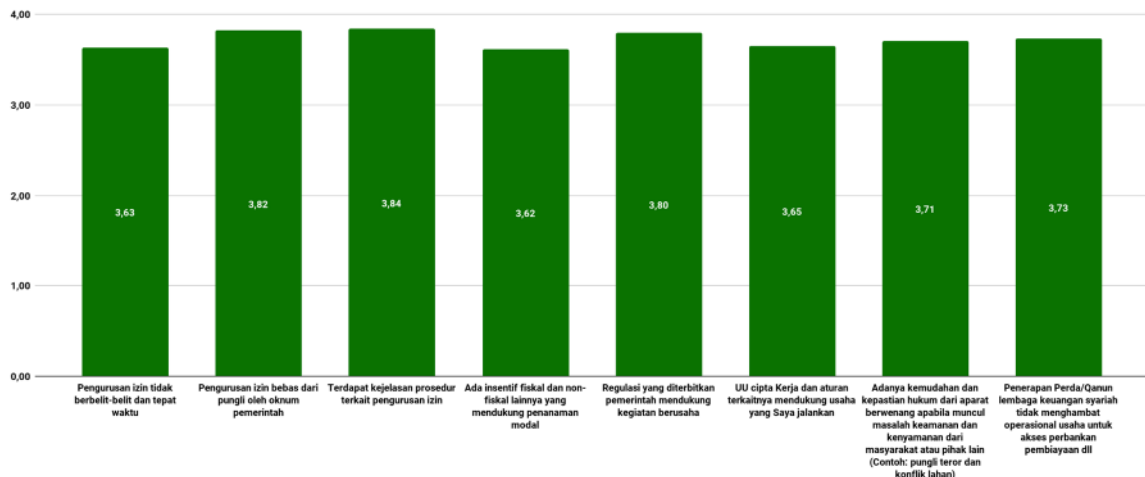
Terkait Variabel Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur, pelaku usaha dihadapkan pada permasalahan aktivitas/kegiatan pengiriman, baik *dari* dan *ke luar* Aceh, maupun ke luar negeri. Hal ini dapat dibuktikan dengan rata-rata skor ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang paling rendah terdapat pada Sektor Industri Kayu dan Sektor Pertambangan dengan skor masing-masing 2,33 dan 3,43 dari skor maksimal 5.

Sektor Pertambangan termasuk juga hasil pengolahan industri kayu serta pertambangan lainnya membutuhkan pengiriman alat berat, baik dari dalam negeri, maupun luar negeri. Terdapat perbedaan rata-rata skor yang cukup timpang pada sektor-sektor usaha dikarenakan kebutuhan infrastruktur setiap sektor yang berbeda-beda.

4. Regulasi dan Administrasi Pemerintah



(a)

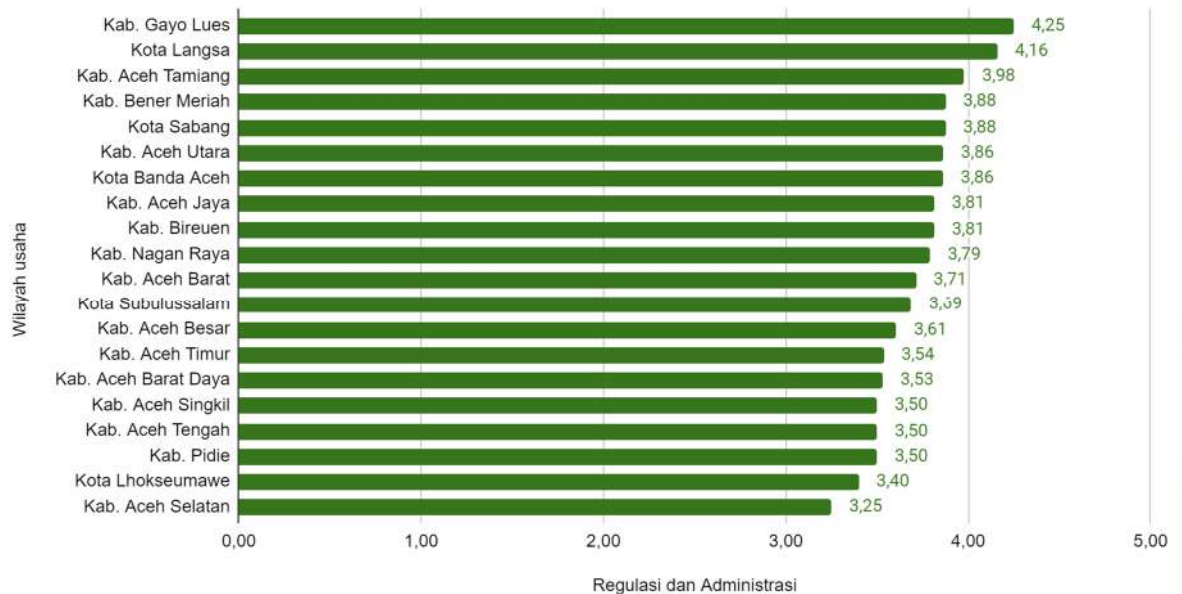


(b)

Gambar 4.10. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Aspek Regulasi dan Administrasi Pemerintah

(a) sebaran jawaban responden (b) skor rata-rata jawaban responden

Berdasarkan penjelasan indikator pada Gambar 4.10, dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa masalah terkait dengan regulasi dan administrasi Pemerintah, terutama pada pengurusan izin yang dianggap masih berbelit-belit serta penerapan Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang masih menghambat kegiatan operasional pelaku usaha. Selain itu pelaku usaha juga mengeluhkan mengenai aturan perizinan yang senantiasa berganti/tumpang tindih serta perbedaan aturan terkait pengurusan izin di setiap instansi.

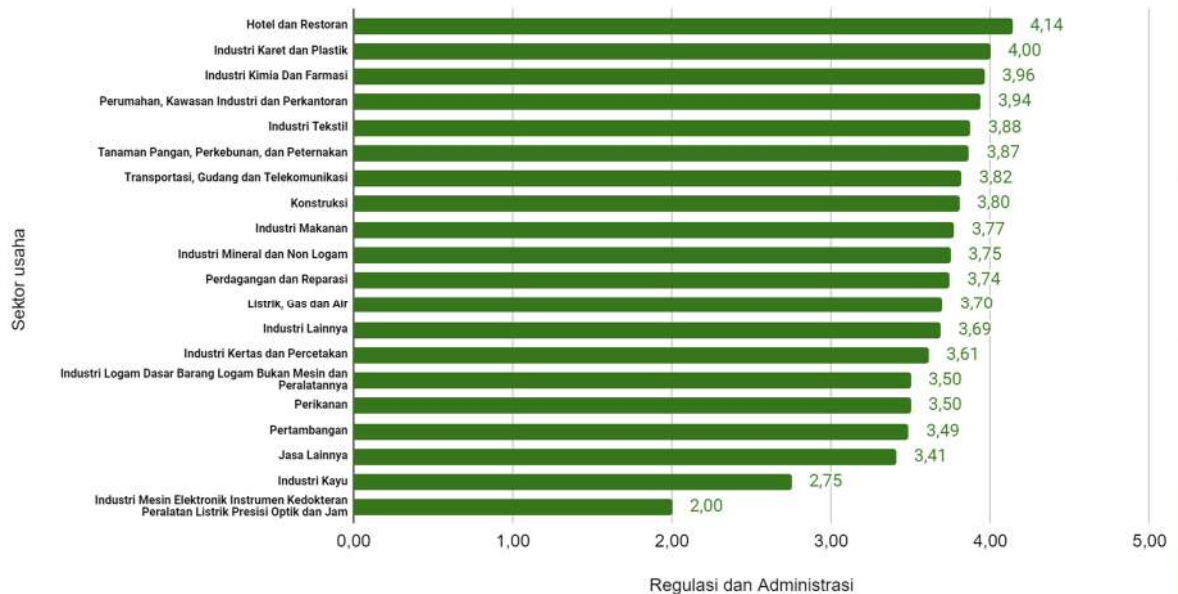


Gambar 4.11. Regulasi dan Administrasi Pemerintah berdasarkan Wilayah Usaha

Kabupaten Gayo Lues yang dijuluki “Negeri Seribu Bukit” memiliki rata-rata skor paling tinggi untuk variabel regulasi dan administrasi, yaitu 4,25 dari skor maksimal 5. Tidak ada permasalahan serius yang berkenaan dengan regulasi dan administrasi di wilayah usaha tersebut. Begitu juga dengan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang berada di posisi 3 teratas dengan rata-rata skor yang tinggi, masing-masing 4,16 dan 3,98.

Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan menjadi kota yang memiliki rata-rata skor terendah, yaitu 3,25 dari kemungkinan skor maksimal 5. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih sulitnya proses administrasi dan adanya pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan perizinan. Permasalahan yang sama juga dihadapi oleh Kota Lhokseumawe, Kabupaten Pidie, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Nagan Raya.

Lain halnya, pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil mengeluhkan permasalahan yang berbeda, dimana penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dianggap masih memperlambat kegiatan operasional pelaku usaha di wilayah tersebut.

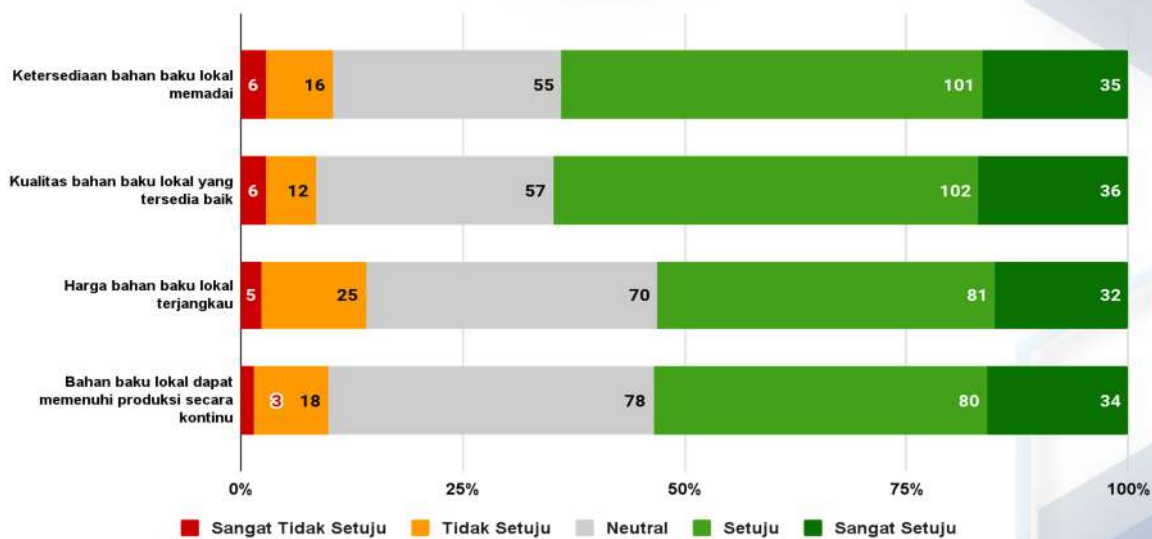


Gambar 4.12. Regulasi dan Administrasi Pemerintah berdasarkan Sektor Usaha

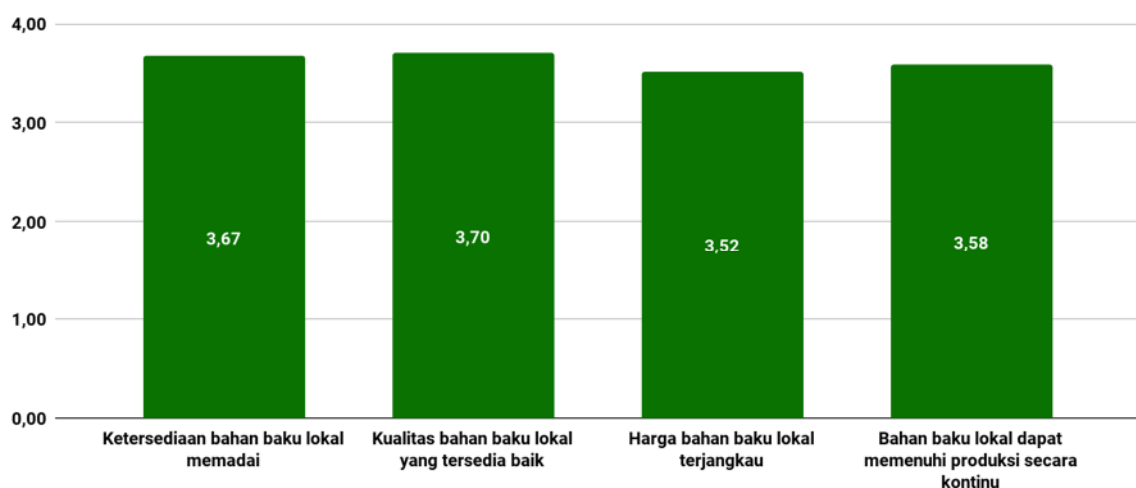
Berdasarkan penjelasan Gambar 4.12, dapat disimpulkan bahwa Sektor Hotel dan Restoran memiliki rata-rata skor tertinggi pada Persepsi tentang Regulasi dan Administrasi Pemerintah, yaitu 4,14 dari maksimal 5. Sementara, untuk Sektor Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi Optik, dan Jam berada pada rata-rata skor terendah, yaitu 2,00. Pelaku usaha berharap kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem dan regulasi perizinan serta sistim perbankan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka mendukung transaksi ke luar Aceh, baik melalui bank syariah, maupun bank lokal, termasuk juga kemudahan kepada pelaku usaha untuk memperoleh akses/jaminan perbankan.

Secara keseluruhan, pelaku usaha di Aceh juga berharap adanya tindak lanjut dari Pemerintah Aceh agar segala proses administrasi dan perizinan dapat dipermudah dan bebas pungutan liar (pungli).

5. Penggunaan Bahan Baku Lokal



(a)



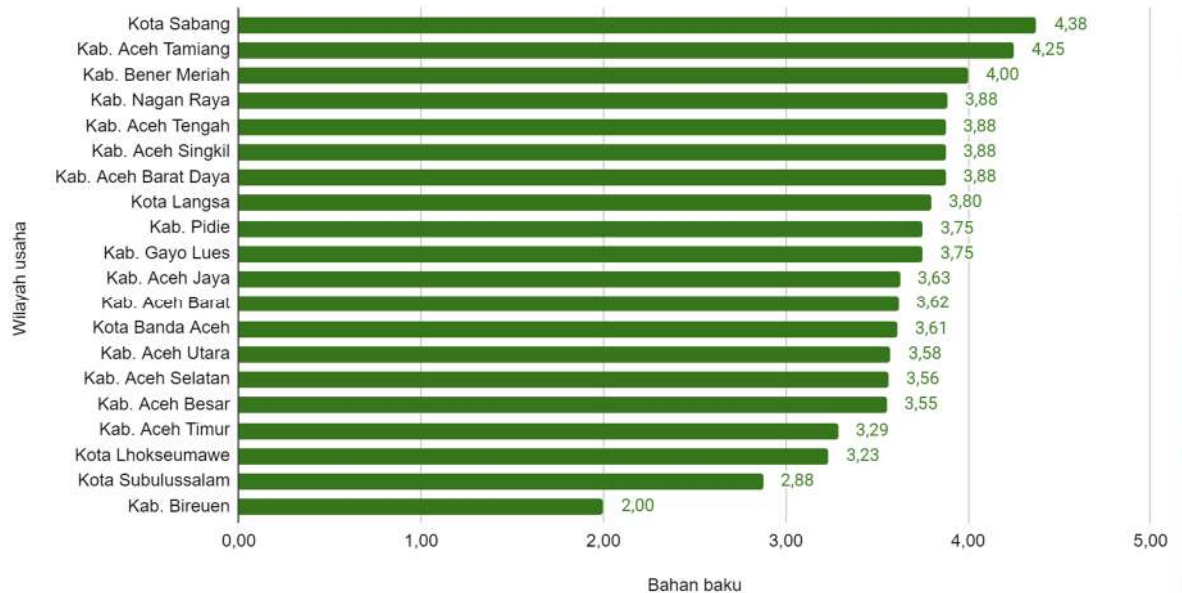
(b)

Gambar 4.13. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Aspek Penggunaan Bahan Baku Lokal

(a) sebaran jawaban responden (b) skor rata-rata jawaban responden

Berdasarkan penjelasan indikator pada Gambar 4.13, dapat disimpulkan bahwa bahan baku lokal yang digunakan perusahaan di setiap wilayah usaha di Aceh cukup memadai. Namun, masih terdapat permasalahan yang menghambat pelaku usaha, seperti melambungnya harga bahan baku lokal dan bahan bakar minyak (BBM) untuk industri, serta terbatasnya jumlah bahan baku lokal dalam memenuhi produksi secara kontinu.

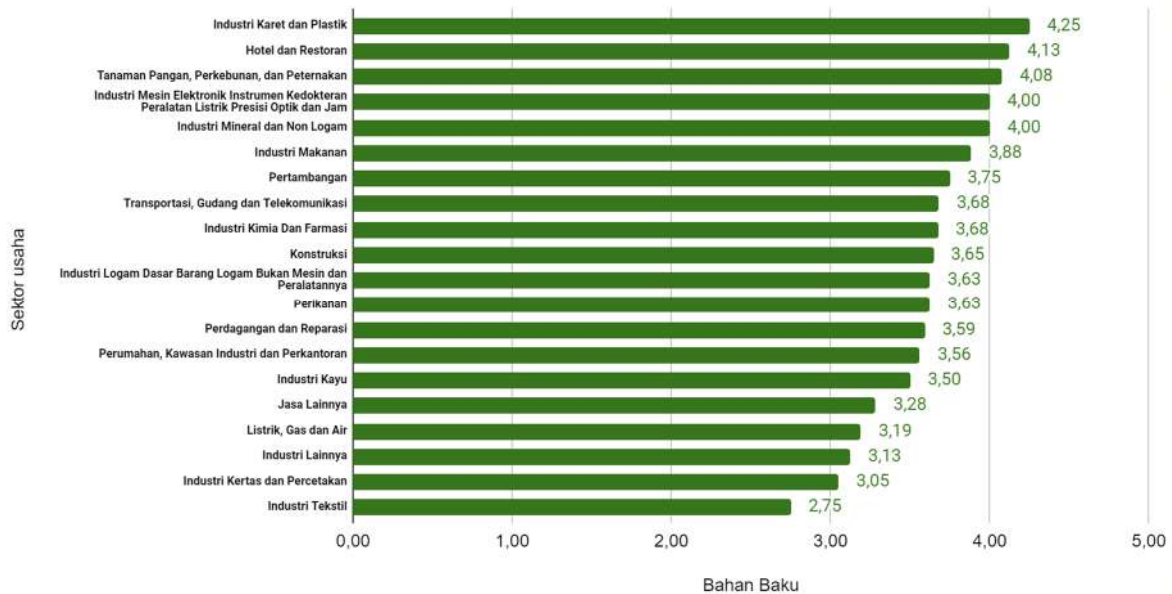
Hal ini sejalan dengan skor terendah dari indikator harga bahan lokal, yaitu 3,52 dari skor maksimal 5, dan diikuti oleh bahan baku lokal untuk memenuhi produksi (3,58). Berbagai permasalahan diatas mengakibatkan pelaku usaha cenderung memilih menggunakan bahan baku dari luar daerah, terutama dari Sumatera Utara.



Gambar 4.14. Penggunaan Bahan Baku Lokal berdasarkan Wilayah Usaha

Berdasarkan pada Gambar 4.14, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahan baku lokal yang tidak merata bila ditinjau berdasarkan wilayah usaha. Kota Sabang memiliki rata-rata skor tertinggi pada Variabel Penggunaan Bahan Baku Lokal, yaitu 4,38 dari skor maksimal 5. Hal ini dikarenakan responden di Kota Sabang yang didominasi Bidang Usaha Industri Hotel dan Restoran. Bidang usaha ini sudah mampu untuk mengatasi masalah terkait bahan baku dengan cara mendatangkan dari luar Kota Sabang.

Sedangkan Kabupaten Bireuen memiliki rata-rata skor terendah, yaitu hanya 2,00 dari maksimal 5, dimana permasalahan utama yang dihadapi terkait keterbatasan bahan galian C. Lain halnya Kota Subulussalam dan Kota Lhokseumawe menghadapi permasalahan terkait harga dan ketersediaan bahan baku, terutama bahan material.



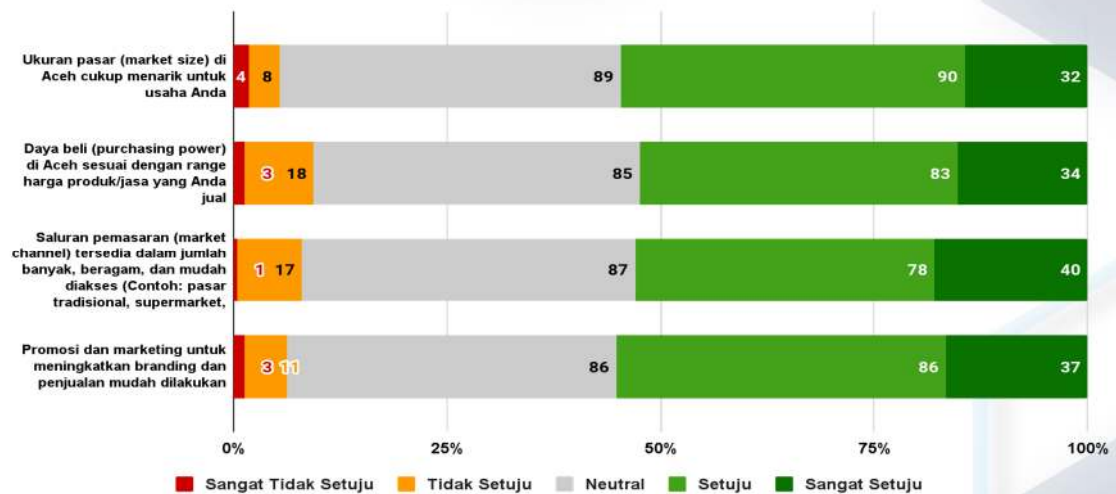
Gambar 4.15. Penggunaan Bahan Baku Lokal berdasarkan Sektor Usaha

Berdasarkan pada Gambar 4.15, dapat disimpulkan bahwa Variabel Penggunaan Bahan Baku Lokal di setiap sektor usaha sudah cukup memadai. Sektor Industri Karet dan Plastik memiliki rata-rata skor tertinggi pada Variabel Penggunaan Bahan Baku Lokal, yaitu 4,25 dari maksimal 5. Pelaku usaha di sektor ini tidak menghadapi masalah serius terkait penggunaan bahan baku lokal.

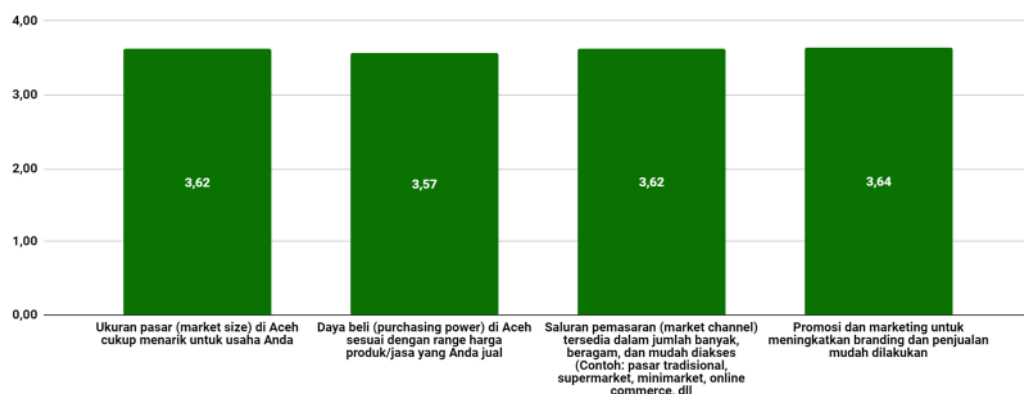
Sedangkan Sektor Industri Tekstil memiliki rata-rata skor terendah, yaitu 2,75 dari maksimal 5. Hal ini akibat masih terbatasnya ketersediaan bahan baku lokal dan harga yang relatif tinggi, sehingga masih mengandalkan bahan baku dari Provinsi Sumatera Utara.

Lain halnya, permasalahan yang dihadapi Sektor Industri Listrik, Gas dan Air adalah harga bahan baku lokal yang cukup tinggi dibandingkan dari luar Aceh. Permasalahan ini juga dihadapi oleh beberapa sektor lainnya.

6. Kondisi Pasar



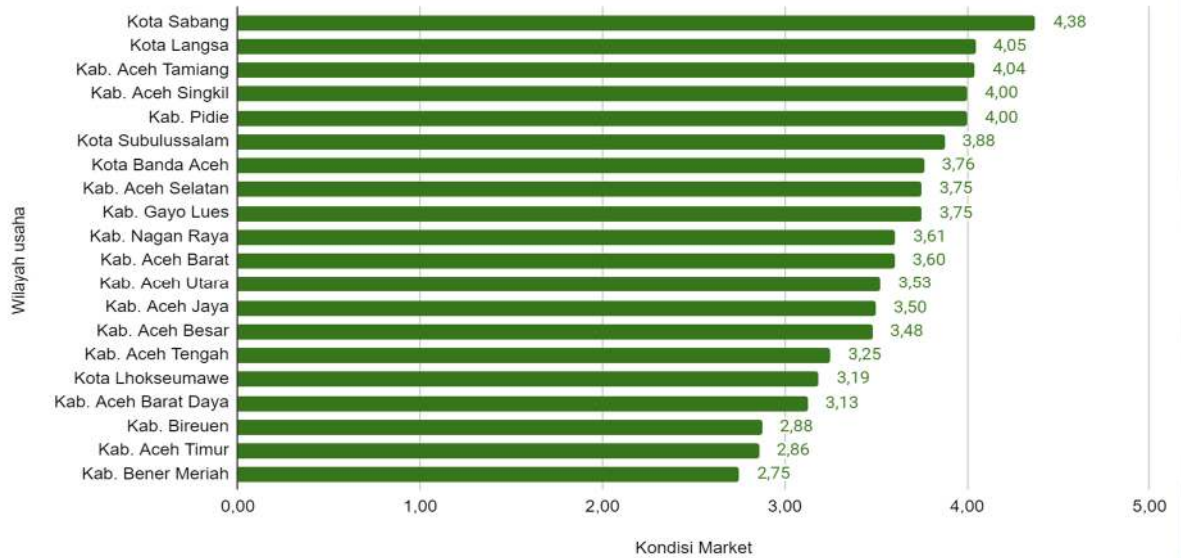
(a)



(b)

Gambar 4.16. Persepsi Pelaku Usaha terhadap Aspek Kondisi Pasar
(a) sebaran jawaban responden (b) skor rata-rata jawaban responden

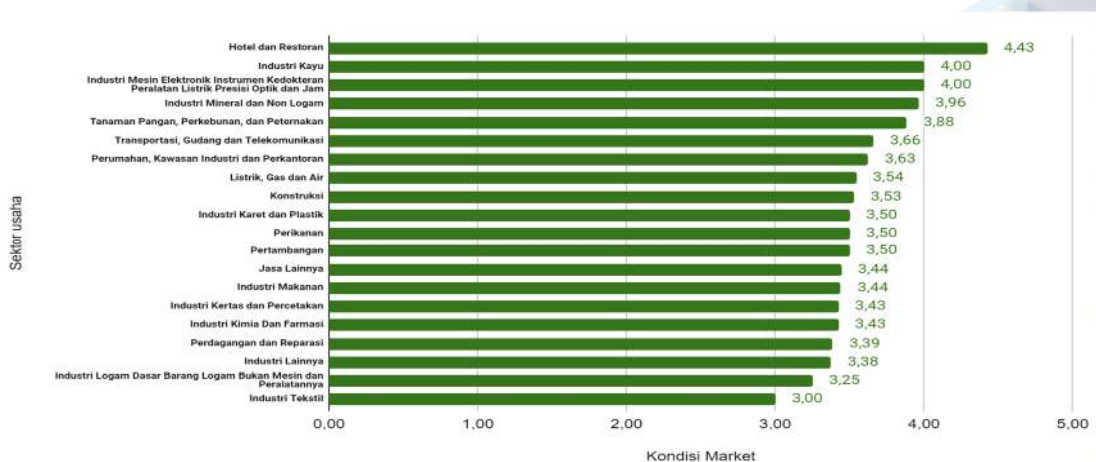
Berdasarkan penjelasan indikator pada Gambar 4.16, dapat disimpulkan bahwa distribusi skor untuk Variabel Kondisi Pasar cukup proporsional (merata) pada kondisi yang memprihatinkan. Hal ini menandakan persepsi pelaku usaha terkait Kondisi Pasar di Aceh hampir seragam, yaitu rata-rata melihat keadaan memprihatinkan hingga 50 persen jika respon yang sangat tidak setuju, tidak setuju, dan netral digabungkan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha terkait Variabel Kondisi Pasar, meliputi terbatasnya pemasaran, rendahnya ukuran pasar (*market size*) dan terbatasnya daya beli masyarakat Aceh.



Gambar 4.17. Kondisi Pasar berdasarkan Wilayah Usaha

Berdasarkan pada Gambar 4.17, dapat disimpulkan bahwa Kota Sabang memiliki rata-rata skor tertinggi pada Variabel Kondisi Pasar dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu 4,38, terutama Sektor Industri Hotel dan Restoran. Kota Langsa berada di posisi kedua dengan rata-rata skor, yaitu 4,05.

Sedangkan Kabupaten Bener Meriah memiliki rata-rata skor terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu 2,75. Perbedaan skor antara Kota Sabang dengan Kabupaten Bener Meriah cukup jauh. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasar di setiap kabupaten/kota di Aceh belum merata.



Gambar 4.18. Kondisi Pasar berdasarkan Sektor Usaha

Berdasarkan pada Gambar 4.18, dapat disimpulkan bahwa Sektor Hotel dan Restoran memiliki rata-rata skor tertinggi pada Variabel Kondisi Pasar dibandingkan sektor lainnya, yaitu 4,43. Banyaknya destinasi wisata di Aceh sangat mendukung kondisi pasar sektor tersebut. Sesuai penjelasan sebelumnya, Kota Sabang yang merupakan salah satu destinasi wisata memiliki kondisi pasar yang paling bagus. Hal ini sejalan dengan Sektor Hotel dan Restoran yang memiliki skor tertinggi, yaitu 4,43. Sedangkan Sektor Industri Tekstil berada pada kondisi pasar terendah dengan skor 3,00.

Sektor Pertambangan memiliki kondisi pasar yang kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh adanya tumpang tindih (*overlapping*) peraturan dan kurangnya daya beli masyarakat lokal di Aceh. Namun, rata-rata skor pada setiap sektornya tidak jauh berbeda. Hal ini membuktikan kondisi pasar di setiap sektor cukup merata.

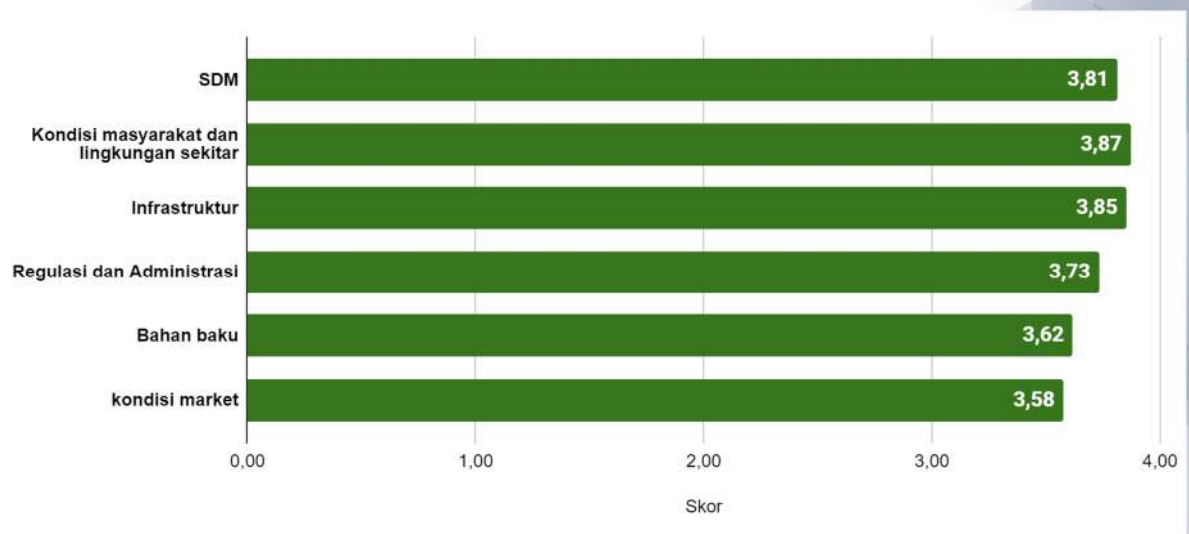
Membahas masalah pasar tidak terlepas dari permasalahan minyak goreng dan kelapa sawit. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh industri ini adalah pembatasan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Pembatasan ini telah menimbulkan efek domino, dari terbatasnya penerimaan CPO di perusahaan minyak goreng, hingga merosotnya harga kelapa sawit yang berdampak kepada kesejahteraan petani. Disisi lain perusahaan harus menjaga perusahaan tetap berjalan melalui biaya operasional yang relatif tinggi. Sementara petani harus menjual kelapa sawit dengan harga murah di tengah rendahnya harga kelapa sawit dunia, termasuk masih tingginya biaya produksi perkebunan kelapa sawit.

4.2. Potensi Penghambat Penanaman Modal di Aceh

Berdasarkan Gambar 4.19. Kondisi Keseluruhan Variabel Hambatan Penanaman Modal, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan antara satu variabel dengan variabel lainnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan yang berpotensi menghambat pelaku usaha untuk berinvestasi di Aceh. Namun perlu menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, khusus terkait kondisi pasar, ketersediaan bahan baku,

serta regulasi dan administrasi. Ketiga isu tersebut sesuai dengan hasil survei dengan masing-masing skor, yaitu 3,58, 3,62, dan 3,73.

Banyaknya pelaku usaha yang mengeluhkan mengenai sulitnya mendapatkan sumber bahan baku lokal, sehingga harus dipenuhi dari luar Aceh, khususnya Medan dan Pulau Jawa. Sementara itu, terbatasnya pemasaran, rendahnya ukuran pasar (*market size*) dan terbatasnya daya beli masyarakat Aceh menjadi isu terkait kondisi pasar. Masalah pungli dan regulasi yang tumpang tindih juga masih perlu mendapat perhatian serius. Ketiga isu tersebut memerlukan peran dan partisipasi semua pemangku kepentingan investasi, perdagangan, dan dunia usaha untuk mengatasinya. Perlu ada fokus pada persoalan terkait pemberdayaan potensi sumber daya alam lokal, diversifikasi produk dan perluasan pasar, serta kemudahan berinvestasi dari segi regulasi, perizinan, dan kenyamanan berusaha.



Gambar 4.19. Kondisi Keseluruhan Variabel Hambatan Penanaman Modal

Terlepas dari ketiga isu tersebut, beberapa pelaku usaha masih juga mengeluh terkait profesionalitas dan loyalitas SDM lokal, dimana masih adanya SDM lokal yang tidak mematuhi aturan perusahaan dan rendahnya kemauan untuk bersaing dalam meningkatkan kompetensi dan SDM.

Termasuk juga beberapa isu-isu negatif umum lainnya yang mempengaruhi produktivitas perusahaan, seperti adanya praktek pungutan liar (pungli) oleh oknum-oknum tertentu, baik terkait perizinan, keamanan dan kenyamanan di lokasi usaha, maupun kebijakan pemerintah yang masih tumpang tindih terkait perizinan, keterbatasan infrastruktur, dan konektivitas dasar.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa survei hambatan penanaman modal di Aceh, dapat disimpulkan berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat kegiatan penanaman modal di Aceh bila dilihat dari masing-masing variabel, antara lain:

1. *Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)*; masih rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat rendahnya kemauan untuk belajar dalam upaya meningkatkan profesionalisme di tempat kerja, sehingga berdampak SDM lokal kesulitan untuk bersaing dengan SDM luar daerah. Kabupaten Bener Meriah, Langsa dan Pidie memiliki skor tertinggi untuk Kebutuhan SDM. Sementara skor terendah untuk Kebutuhan SDM dimiliki Kabupaten Bireuen, Aceh Selatan dan Lhokseumawe. Khusus Sektor Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam memiliki skor tertinggi untuk Kebutuhan SDM dan Sektor Industri Kayu memiliki skor SDM terendah.
2. *Masyarakat dan Lingkungan Sekitar (keamanan dan kenyamanan)*; masih adanya praktek pungutan liar (pungli), isu sosial lainnya oleh oknum-oknum tertentu, permasalahan terkait sengketa lahan dan permasalahan lainnya. Kabupaten Pidie, Gayo Lues dan Aceh Tamiang memiliki skor tertinggi untuk Masyarakat dan Lingkungan Sekitar. Sementara skor terendah untuk Masyarakat dan Lingkungan Sekitar dimiliki Kota Lhokseumawe, Aceh Selatan dan Aceh Besar. Khusus Sektor Industri Mesin Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi Optik dan Jam memiliki skor tertinggi untuk Masyarakat dan Lingkungan Sekitar dan Jasa Lainnya memiliki skor terendah.

3. *Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur*; masih terbatasnya infrastruktur pendukung untuk kegiatan ekspor dan impor, seperti akses jalan yang menghubungkan kawasan strategis dengan pusat kota belum tersedia dengan layak, termasuk juga masih terbatasnya sarana pengiriman alat berat, baik *dari* dan *ke* dalam negeri, maupun luar negeri (masalah konektivitas). Kota Sabang, Langsa dan Banda Aceh memiliki skor tertinggi untuk Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur. Sementara skor terendah dimiliki Kota Lhokseumawe, Aceh Timur dan Bener Meriah. Sedangkan berdasarkan sektor, Sektor Hotel dan Restoran memiliki skor tertinggi untuk Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan skor terendah adalah Sektor Industri Kayu.
4. *Regulasi dan Administrasi Pemerintah*; masih rumitnya pengurusan izin usaha, kebijakan Pemerintah terkait perizinan cenderung berubah-ubah/tumpang tindih (*overlapping*), dan penerapan Qanun LKS dianggap memperlambat kegiatan operasional pelaku usaha. Kabupaten Gayo Lues dan Langsa memiliki skor tertinggi untuk Regulasi dan Administrasi Pemerintah. Sementara skor terendah untuk Regulasi dan Administrasi Pemerintah dimiliki oleh Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Lhokseumawe. Khusus Sektor Hotel dan Restoran memiliki skor tertinggi untuk Regulasi dan Administrasi Pemerintah dan Sektor Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi Optik, dan Jam memiliki skor terendah.
5. *Penggunaan Bahan Baku Lokal*; masih terbatasnya bahan baku pendukung kegiatan produksi perusahaan, baik dalam kuantitas, kontinuitas, harga, maupun kualitas. Kota Sabang, Kabupaten Aceh Tamiang dan Bener Meriah memiliki skor tertinggi untuk Penggunaan Bahan Baku Lokal. Sementara Kabupaten Bireuen, Aceh Timur dan Bener Meriah memiliki skor terendah untuk Penggunaan Bahan Baku Lokal. Khusus Sektor Hotel dan Restoran memiliki skor tertinggi dan Sektor Industri Tekstil memiliki skor terendah untuk Penggunaan Bahan Baku Lokal.

6. *Kondisi Pasar*; masih terbatasnya distribusi pemasaran produk dan ukuran pasar (*market size*) serta rendahnya daya beli masyarakat Aceh. Kota Sabang dan Langsa memiliki skor tertinggi untuk Kondisi Pasar. Sementara Kabupaten Bireuen, Aceh Timur dan Bener Meriah memiliki skor terendah untuk Kondisi Pasar. Khusus Sektor Hotel dan Restoran memiliki skor tertinggi dan Sektor Industri Tekstil memiliki skor terendah untuk Kondisi Pasar.

5.2. Rekomendasi

Dari beberapa kesimpulan tersebut di atas yang terkait dengan analisa hasil survei hambatan penanaman modal di Aceh, maka dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan/keputusan terkait kegiatan penanaman modal di Aceh. Rekomendasi ini tidak hanya ditujukan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kementerian/Lembaga, khususnya Kementerian Investasi/BKPM RI, tapi juga kepada pemangku kepentingan, dan pelaku usaha lainnya.

Beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti melalui rencana aksi (*renaksi*) dalam rangka mewujudkan Aceh sebagai Destinasi Penanaman Modal yang aman dan nyaman bagi setiap pelaku usaha/investor. Rekomendasi tersebut dituangkan berdasarkan isu masing-masing variabel, sebagai berikut:

1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Perlunya pelatihan calon dan karyawan pemula untuk memiliki kompetensi/skill yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI);
- b. Karyawan harus memiliki kapasitas melalui penguasaan IT dan komunikasi sesuai kebutuhan era industri 4.0;
- c. Program dan Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja berbasis kompetensi; dan
- d. Kompetensi tenaga kerja yang sesuai potensi industri dan usaha lokal dengan standar nasional dan internasional.

2. Masyarakat dan Lingkungan sekitar (Keamanan dan Kenyamanan)

- a. Pertemuan interaktif antara pelaku usaha dan masyarakat sekitarnya untuk membangun komunikasi dua arah tentang isu-isu kesejahteraan masyarakat, sosial budaya, kelestarian lingkungan, dan pendidikan, pelatihan/alih teknologi *know-how*;
- b. Kerjasama pengembangan daerah lokasi perusahaan melalui kerjasama berbasis *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
- c. Komitmen antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan terkait, terutama aparat keamanan dan penegak hukum lainnya dalam menjaga keamanan, meniadakan pungli, dan meminimalisir konflik sosial atau *social clash*;
- d. Kerjasama dengan masyarakat setempat untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan penanaman modal di daerah;
- e. Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanaman modal dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan/usaha baru bagi masyarakat.

3. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur

- a. Pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan penanaman modal meliputi konektivitas dan utilitas untuk keperluan industri dan dunia usaha, seperti energi listrik, jalan, air bersih, jembatan, telekomunikasi dan sarana pendukung lainnya;
- b. Mendukung industri hilirisasi melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung *dari* dan *ke* bandara, pelabuhan laut dan kawasan ekonomi strategis lainnya.

4. Regulasi dan Administrasi Pemerintah

- a. Menciptakan debirokratisasi dan regulasi yang pro penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan (*eases of doing business*);
- b. Melakukan sosialisasi terkait OSS-RBA bagi pelaku usaha;

- c. Menempatkan unsur tenaga teknis dari instansi terkait pada DPMPSTP Aceh untuk percepatan pengambilan kebijakan/keputusan sesuai sektor terkait;
- d. Melakukan sosialisasi E-klinik Perizinan melalui link <https://e-klinikdpmptsp.acehprov.go.id/>.

5. Penggunaan Bahan Baku Lokal

- a. Menjamin ketersediaan, kuantitas, kontinuitas, harga, dan kualitas bahan baku pendukung operasional perusahaan;
- b. Meningkatkan potensi sumber daya alam lokal, diversifikasi produk dan perluasan pasar;
- c. Memetakan berbagai potensi sumber daya alam lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam mendukung kegiatan penanaman modal di daerah.

6. Kondisi Pasar

- a. Memetakan potensi pemasaran produk, baik di Aceh, di luar Aceh, maupun di luar negeri seperti dalam kawasan IMT-GT, ASEAN, dan kawasan Indo-Pasifik.
- b. Melakukan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi produk/lahan melalui kegiatan pendampingan dan penyuluhan;
- c. Peningkatan kerjasama dengan sektor pengetahuan (perguruan tinggi, lembaga kajian, dan masyarakat sipil) untuk penguatan inovasi dalam menciptakan berbagai produk lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk bersaing di pasar global;
- d. Meningkatkan kegiatan promosi berbagai produk unggulan, sekaligus membangun jaringan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya, baik dalam negeri, maupun luar negeri;
- e. Memanfaatkan teknologi digital, media baru, dan media sosial untuk peningkatan seluruh proses bisnis terutama untuk *brand-development*, penjualan dan pemasaran.



LAMPIRAN

DOKUMENTASI PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN LAPORAN HAMBATAN INVESTASI DI ACEH 2022

1. FGD KE- I

Tanggal 11 Mei 2022





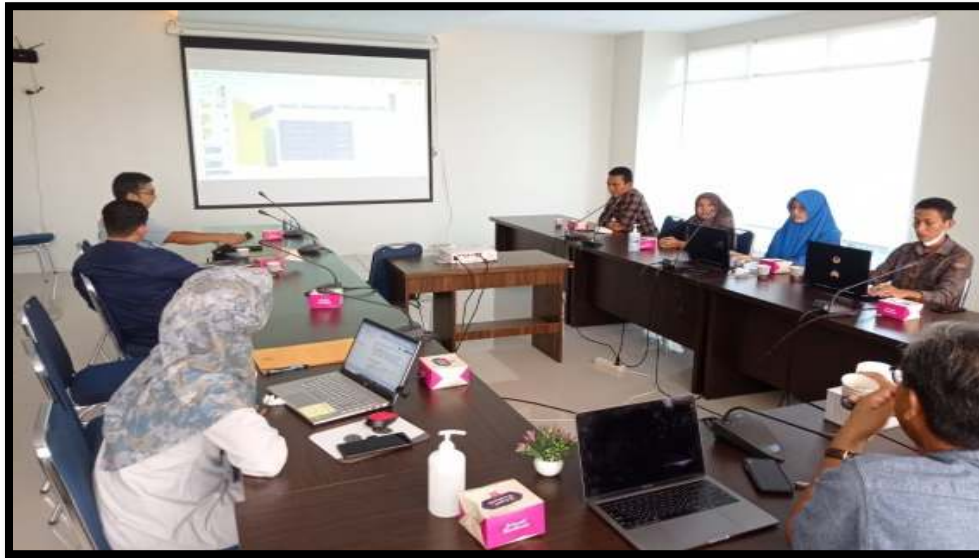
3. FGD ke-3

Tanggal 30 Mei 2022



4. FGD ke -4

Tanggal 10 Juni 2022



5. FGD ke 5

Tanggal 26 Oktober 2022



**DOKUMENTASI
PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA
DAN KOORDINASI DENGAN PELAKU USAHA**

1. Kota Langsa, Tanggal 22 Juni 2022



2. Aceh Tamiang, Tanggal 23 Juni 2022



3. Kabupaten Aceh Barat, Tanggal 06 Juli 2022



4. Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 07 Juli 2022



5. Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 07 Juli 2022



6. Rapat Koordinasi Dengan Pelaku Usaha, Banda Aceh
Tanggal 22 Juli 2022

